

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar didunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km², dan Laut Teritorial Indonesia seluas 3,1 km². Selain itu, tersebar didalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Wilayah lautan Indonesia terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) sektor yang ada di lautan, yang dapat dikembangkan serta dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat Indonesia, yaitu meliputi: a) Perikanan tangkap, b) Perikanan budidaya, c) Industri pengolahan hasil budidaya, d) Industri bioteknologi kelautan, e) Pertambangan dan energi, f) Pariwisata bahari, g) Transportasi laut, h) Industri dan jasa maritim, i) Pulau-pulau kecil, j) Sumber daya non-Konvensional, k) Bangunan kelautan, l) Benda-benda berharga dan warisan budaya, m) Jasa lingkungan Konversi dan Biodiversitas (Retnowati. 2011).

Perikanan menjadi salah satu SDA yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam

meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011, potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia sebesar 6,52 juta ton (Samosir, 2012). Berdasarkan data Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga diketahui bahwa potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan adalah 6,4 juta ton pertahun (Danuri, 2013) Berbanding terbalik dengan luasnya garis pantai di Indonesia, penduduk yang memiliki mata pencaharian di Indonesia masih sangat timpang dan masih dalam garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang (Sugra, 2014). Kemiskinan yang membelenggu nelayan di negara maritim ini sudah berlangsung lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan zaman, bahkan pendapatan nelayan Indonesia berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia yakni sebesar Rp. 520 ribu per bulan (Solicha, 2013). Keberadaan nelayan secara sosial dan ekonomi, dalam arti jumlah nelayan di Indonesia rata-rata didominasi oleh nelayan penggarap dan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Menurut data Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (2009) jumlah nelayan di Indonesia sampai tahun 2009 tercatat ada 2.752.490 orang dengan total armada 596.230 unit. Dari keseluruhan jumlah tersebut 90% nya adalah nelayan kecil dengan bobot mati kapal di bawah 30 GT, dan dalam kenyataannya mayoritas nelayan (nelayan tradisional), Samosir (2012), menyatakan keadaan ekonomi nelayan di daerah pesisir sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama dari sarana dan musim. Faktor dari aspek sarana yang mempengaruhi meliputi (a) ukuran tonase kapal,

(b) jumlah anggota nelayan dalam operasi penangkapan ikan dan (c) wilayah penangkapan ikan. Maiwa (2010) menyatakan Kondisi cuaca buruk dan tingginya gelombang laut disertai angin kencang, di ratusan kapal nelayan tradisional dan modern takut melaut. Mereka berhenti sementara waktu melakukan penangkapan ikan guna menghindari terjadinya kecelakaan di laut akibat dari cuaca ekstrim. Sebagian besar kapal nelayan disini tidak berangkat melaut, karena hingga saat ini ombak masih tinggi dan sangat membahayakan keselamatan para nelayan. Begitupun ada juga beberapa kapal nelayan yang tetap memberanikan diri untuk tetap melaut. Kondisi armada kapal perikanan nelayan Indonesiapun masih kurang memadai untuk melakukan proses penangkapan disaat cuaca tidak baik, maka sering kali melakukan operasi penangkapan hanya dilakukan diperairan sekitar pantai saja.

Perikanan tangkap adalah suatu upaya/kegiatan yang menyangkut perusahaan suatu sumberdaya di laut atau melalui perairan umum melalui cara penangkapan baik secara komersial atau tidak. Kegiatan ini meliputi penyediaan prasarana, sarana, kegiatan penangkapan, penanganan hasil tangkapan, pengolahan serta pemasaran hasil (Nurhakim, 2006).

Pengertian nelayan tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan yang memberikan makna yang berbeda, yaitu: a. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, serta ketentuan Pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”. Dalam UU ini juga disebutkan pengusaha perikanan. b. UU Nomor 16

Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mendefinisikan nelayan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. c. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai nelayan modern dan pengusaha 5 perikanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. e. UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan memberikan definisi nelayan menjadi beberapa kategori: 1) Pasal 1 huruf b menjelaskan Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. 2) Pasal 1 huruf c menjelaskan definsi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the Work in Fishing Convention) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh sistem bagi hasilnya. Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangkapan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) mendapatkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan penggarap.

Sistem bagi hasil berdasarkan nilai investasi yang ditanam pada pemanfaatan sumberdaya laut sebenarnya belum dikenal pada masyarakat yang masih menganut sistem pemilikan komunal. Sistem bagi hasil tangkapan yang mempertimbangkan aset produksi dengan orang yang bekerja dalam proses produksi mulai dikenal setelah sistem mata pencaharian berkembang dan mengakui adanya hak milik perorangan, serta mempertimbangkan investasi perorangan dalam usaha penangkapan ikan. Sistem bagi hasil yang diterapkan biasanya ditentukan dari jenis teknologi yang dikembangkan, dan besarnya kontribusi modal yang

ditanam. Besarnya bagi hasil tangkapan juga bisa didasarkan pada faktor kontribusi yang diberikan masing-masing anggota penangkapan (Zerner, 1995). Pada masyarakat nelayan yang masih menggunakan peralatan sederhana, kontribusi anggota kelompok penangkapan masih dimungkinkan terjadi. Namun pada usaha perikanan yang padat modal agak sulit terjadi. Sebagaimana dikatakan Zerner, kecenderungan setiap investor pada usaha perikanan tangkap melakukan monopoli keuntungan melalui penguasaan mesin kapal, perahu dan alat tangkap, yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem pembagian hasil tangkapan.

Menurut UUBHP No 16 Tahun 1964, pembagian hasil tangkapan perikanan laut bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan dan tercapainya kesetaraan pendapatan nelayan. Perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik. Menurut perjanjian, mereka masing-masing akan menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya (Lembar Negara No 97, 1964). UU Bagi hasil Nomor 16 Tahun 1964 adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian antara nelayan.

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di dasari oleh, yaitu: *Pertama*, adalah kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; *Kedua*, adalah sikap spekulatif (*gambling*) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan; dan *Ketiga*, adalah hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu. Sedangkan alasan dari para *juragan* yang lebih suka memilih

sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para *juragan* berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama (Masyhuri, 1999).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besarnya kisaran pendapatan Nelayan *sro'ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana mekanisme praktik bagi hasil nelayan *sro'ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pendapatan yang diperoleh nelayan *sro'ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban
2. Untuk menjelaskan mekanisme praktek sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan *sro'ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis Untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada dan menambah khasanah keilmuan
2. Aspek praktis Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, agar mengerti tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Sebagai bahan kajian bagi para pembaca, para praktisi khususnya bagi mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Perikanan

1.5 Definisi Dan Batasan Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pengertian terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis pola dan mekanisme sistem bagi hasil nelayan *sro’ol* di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban” Maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

1. Pola : Bentuk atau atau model (atau lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu.
2. Mekanisme : cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) atau cara menjalankan sesuatu
3. nelayan : adalah seorang yang bekerja di laut orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
4. *sro’ol* : salah satu perahu tradisional Jawa Timur yang terdiri dari beberapa papan dan balok lunas yang mempunyai ukuran pokok L.B.D = $(6,8 - 7,2) \times (1,8 - 1,9) \times (0,6 - 0,75)$ meter
5. Sistem bagi hasil : adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Perikanan adalah segala usaha penangkapan, budidaya, serta pengolahan sampai pemasarannya. Sedang yang dimaksud sumber perikanan ialah binatang dan tumbuhan yang hidup diperairan baik darat atau laut (Mubyarto, 1994).

Usaha penangkapan ikan laut disebut perikanan laut, yang dilakukan perairan pantai atau di lepas pantai. Usaha perikanan laut meliputi penangkapan ikan, pengambilan mutiara, pengambilan rumput laut dll. yang umumnya dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal didaerah pantai.

Usaha perikanan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut yakni ikan sebagai sumberdaya hayati, perairan sebagai sumberdaya alam, nelayan sebagai produsen, pengolah, lembaga pemasaran serta masyarakat umum selaku konsumen akhir (Mandak, 2004).

Usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya (perikanan budidaya/akuakultur) dan mengelolanya demi memenuhi kebutuhan manusia atau pangan sumber protein atau non pangan.

Dewasa ini ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja (*on farm*), tetapi juga mencakup kegiatan (*off farm*), seperti pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengelolaan,

pemasaran, permodalan, riset, dan pengembangan perundang-undangan, serta faktor pendukung usaha lainnya (Effendi dan Oktariza, 2006).

Perikanan tangkap adalah suatu upaya/kegiatan yang menyangkut pengusahaan suatu sumberdaya di laut atau melalui perairan umum melalui cara penangkapan baik secara komersial atau tidak. Kegiatan ini meliputi penyediaan prasarana, sarana, kegiatan penangkapan, penanganan hasil tangkapan, pengolahan serta pemasaran hasil (Nurhakim, 2006).

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktifitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup dikawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang dan arus laut sehingga aktifitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun, pada periode waktu tertentu nelayan tidak melaut karena angin kencang gelombang besar dan arus laut yang kuat. Kondisi alam ini kerap kali disebut musim paceklik yaitu musim dimana nelayan tidak melaut sama sekali.

Pembangunan sektor perikanan merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, serta membuka peluang untuk meningkatkan dan memperluas lapangan kerja. Pembangunan perikanan meliputi dua aspek yaitu aspek fisik menyangkut pembangunan prasarana dan sarana perikanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dan aspek manusia menyangkut peningkatan kesejahteraan nelayan yang lebih adil dan merata.

Pembangunan perikanan pada hakeketnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berkesenambungan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Untuk meningkatkan produksi tangkapan tersebut dilakukan

dengan cara mengusahakan unit penangkapan yang lebih produktif (Dahuri et all, 2008).

Batasan atau definisi nelayan banyak dikemukakan oleh pakar, seperti Panayotou, Berkes, Satria, Ostrom dan Schlager, serta Kusnadi. Panayotou (1985) mengelompokan nelayan ke dalam empat kelompok utama, yaitu *subsistence*, *indigenous*, *commercial* dan *recreation*. Sementara itu nelayan komersial dikelompokan lagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri. Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu: a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik.

b. Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.

c. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional.

Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih

Selain hal tersebut di atas, beberapa pakar juga menyebut mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan dengan alat-alat

yang merupakan warisan tradisi leluhurnya. Umumnya alat-alat tersebut murah, mudah dan ramah lingkungan. Mudah karena biasanya merupakan keterampilan turun temurun, murah karena berasal dari bahan-bahan di sekitar kampung, ramah lingkungan karena tidak merusak dan hanya untuk keperluan hidup secukupnya. Menjadi Nelayan Tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi *survival* semata. Akan tetapi juga mengandung pengertian ekonomi dan kebudayaan sekaligus. Secara ekonomi merupakan kegiatan *survival*, secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya.

Statistik perikanan menyebut nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya, yakni, sebagai berikut:

- 1) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- 2) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan

penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan

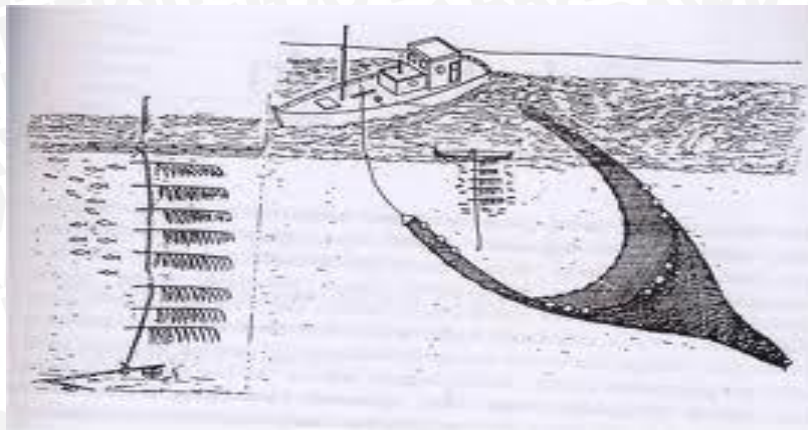
Perahu *sro'ol* atau perahu weron adalah salah satu perahu tradisional Jawa Timur yang terdiri dari beberapa papan dan balok lunas yang mempunyai ukuran pokok L.B.D = $(6,8 - 7,2) \times (1,8 - 1,9) \times (0,6 - 0,75)$ meter. jenis kayu yang digunakan biasanya kayu jati, kayu meranti, dan kayu kamper. Alat tangkap yang dipergunakan adalah jaring klitik, dogol, payang, jaring gondrong dan gill net. Daerah penyebaran perahu ini adalah tuban (bulu, tambakboyo, karangsari, karangagung, dan secorejo), lamongan (labuhan, brondong, blimbing, kranji dan weru. Tenaga penggeraknya biasanya layar dan mesin tempel batangan, dan jumlah pandeganya biasanya 2- 4 orang (UPT UPPI DKP Probolinggo, 2010). Desain perahu *sro'ol* dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Perahu *sro'ol*

Alat penangkapan ikan adalah alat atau peralatan yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan ikan (Diniah, 2008). Timbulnya banyak jenis alat tangkap dan teknologi penangkapan yang berbeda-beda tidak terlepas karena lautan Indonesia yang beriklim tropis memiliki banyak sekali jenis ikan, udang maupun biota laut lainnya yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Di samping itu kondisi dan topografi dasar perairan daerah satu dengan lainnya berbeda sehingga menjadi salah satu faktor timbulnya banyak jenis alat tangkap. Namun sebagian dari jenis biota lain yang tidak termasuk sasaran penangkapan, kadangkala secara tidak sengaja ikut tertangkap pula. Contoh yang paling jelas adalah penggunaan pukat udang, dimana semua biota dasar ikut tertangkap (Subani & Barus, 1989). Alat penangkapan yang digunakan Nelayan *sro'ol* di Desa Gadon antara lain payang, dogol, wuwu, jaring rajungan dan jaring arad.

Payang termasuk ke dalam klasifikasi pukat kantong. Payang adalah pukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong, badan/perut dan kaki/sayap. Payang mempunyai bagian atas mulut jaring yang menonjol ke belakang. Hal ini dikarenakan payang tersebut umumnya digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis yang biasanya hidup di bagian atas air dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah bila telah terkurung jaring. Payang mempunyai bagian bawah mulut jaring lebih menonjol ke depan maka kesempatan lolos menjadi terhalang dan akhirnya masuk ke dalam kantong jaring. Pada bagian bawah kaki/sayap dan mulut jaring diberi pemberat, sedangkan bagian atas pada jarak tertentu diberi pelampung. Pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan di bagian tengah dari mulut jaring. Pada kedua ujung depan kaki/sayap disambung dengan tali panjang yang umumnya disebut tali selambar (Subani & Barus, 1989). Desain alat tangkap payang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Desain dan keadaan payang dalam operasi penangkapan.

Penangkapan dengan jaring payang dapat dilakukan baik pada malam maupun pada siang hari. Pada malam hari terutama hari-hari gelap (tidak dalam keadaan terang bulan), penangkapan ikan dibantu menggunakan lampu petromak. Sedangkan penangkapan yang dilakukan pada siang hari menggunakan alat bantu payaos/rumpon. Namun, penangkapan ikan kadang kala tanpa alat bantu rumpon, yaitu dengan cara menduga-duga di tempat banyaknya ikan/mencari gerombolan ikan (Subani & Barus, 1989).

Hasil tangkapan payang terutama jenis-jenis ikan pelagis kecil, seperti ikan layang, selar, kembung, lemuru, tembang dan japuh. Hasil tangkapan sangat tergantung pada keadaan daerah dan banyak sedikitnya ikan yang berkumpul di sekitar rumpon (Subani & Barus, 1989). Menurut Purbayanto *et al.* (2010), jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan dengan payang adalah ikan yang hidup bergerombol pada lapisan permukaan perairan, baik yang bergerombol dalam jenis yang sama ataupun dalam jenis berbeda ukuran sama.

Wuwu atau bubu adalah alat tangkap yang umum dikenal dikalangan nelayan, yang berupa jebakan dan bersifat pasif. Bubu sering juga disebut perangkap *traps* dan penghadang *guiding barriers*. Alat ini berbentuk kurungan

seperti ruangan tertutup sehingga ikan tidak dapat keluar untuk melepaskan diri. Prinsip dasar dari bubu adalah menjebak penglihatan ikan sehingga ikan tersebut terperangkap didalamnya, alat ini sering diberi nama sishing pots atau fishing basket (Brandt, 1984).

Alat tangkap bubu terutama digunakan untuk tujuan penangkapan jenis ikan demersal yang hidup di perairan pantai. Bubu dapat juga digunakan dalam penangkapan udang ,lobster, jenis ikan karang. Macam-macam ikan yang tertangkap antara lain ikan merah, lencam,terubuk,rajungan, serta macam-macam udang (Mulyono, 1986).

Subani dan barus (1989), menyatakan bahwa bentuk dari bubu bermacam-macam yaitu bubu berbentuk lipat, sangkar (cages), silider, gendang segitiga memanjang (kubus) atau segi banyak, bulat setengah lingkaran dan lain-lain.

Bentuk bubu biasanya disesuaikan dengan ikan yang akan dijadikan target tangkapan, tetapi meskipun yang dijadikan target tangkapan samaa terkadang bentuk bubu yang dipakai bisai juga berbeda tergantungpada kebiasaan atau pengetahuan nelayan yang mengoperasikannya. Bentuk bubu tidak ada keseragaman diantara nelayan di satu daerah dengan nelayan di daerah lainnya. Secara umum konstruksi bubu terdiri dari rangka, badan, dan pintu masuk, kemudian ada juga yang juga dilengkapidengan pintu untuk mengambil hasil tangkapan dan kantung umpan sebagaitempat untuk menyimpan umpan. rangka bubu ada yang terbuat dari lempengan besi , besi behel, bambu, kayu atau bahan lainnnya, sedangkan badan bubu ada yang terbuat dari anyaman kawat , jaring, waring, anyaman bambu atau bahan yang bisa dijadikan badan bubu. Untuk kantung umpan kebanyakan bahannya

memakai kawat kasa (Martasuganda,2003). Desain alat tangkap wuwu dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 3 . Gambar Wuwu

Jaring arad merupakan salah satu alat tangkap yang termasuk didalam klasifikasi jaring trawl, karena ukurannya kecil sehingga disebut juga minitrawl dan bekerjanya di dasar perairan sama seperti trawl-trawl lainnya sehingga disebut small bottom trawl (Ayodhya, 1981).

Jaring otter trawl (jaring arad) adalah suatu alat yang termasuk ke dalam jenis boat seine. Mengenai bentuk umum daripada jaring arad terdiri dari sepasang sayap atau kaki yang berukuran panjang kurang lebih 20-30 meter, lebar bagian terujung adalah 1 meter (Mulyono, 1986).

Otter trawl adalah terbukanya mulut jaring dikarenakan adanya dua buah papan (sewakan) atau otter board yang dipasang diujung muka kaki atau sayang jaring yang prinsipnya menyerupai layang-layang (Subani, 1989).

Menurut Sadhori (1973), jaring arad adalah jaring yang terdiri dari bagian-bagian kantong ,sayap dan mulut dan dilengkapi dengan kayu (dandelo) pada sayap tegak dan sebuah palang (beam) mendatar untuk membuat mulut jaring

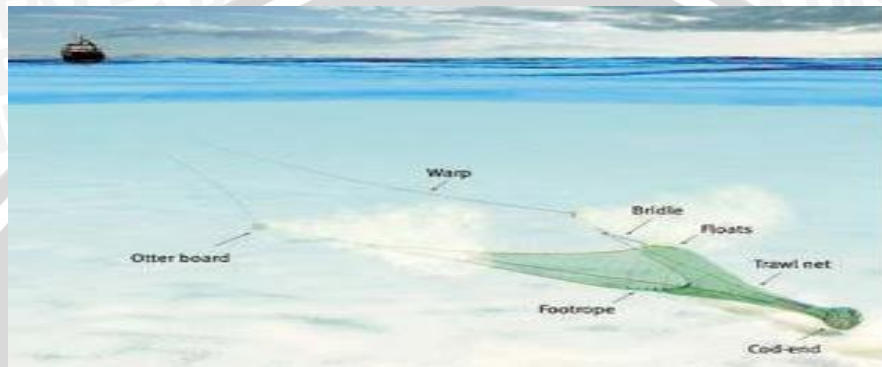
yang terbuka bila ditarik sepanjang dasar perairan. Namun akhir –akhir ini nama arad juga berkembang sejalan dengan perkembangan sejenis jaring pukat yang pengoperasiannya ditarik (pukat tarik) dengan menggunakan perahu atau kapal di dasar perairan.

Jaring arad (*mini trawl*) adalah jaring yang berbentuk kerucut yang tertutup ke arah ujung kantong dan melebar ke arah depan dengan adanya sayap. Bagian-bagiannya terdiri dari dua sayap, mulut, badan dan kantong (*cod-end*) serta dilengkapi dengan pembuka mulut, yaitu *otter board* dan tali temali (*bridle line, warp* dan tali kantong). Jaring arad berkembang di Pantai Utara Jawa. Berbagai sebutan jaring arad pernah muncul di berbagai daerah seperti sotok rebon di Rembang, jaring arad di Tegal-Brebes, gereuk di Jawa Timur, otok di Kendal, dan cotok di Demak (Balai Pengembangan Penangkapan Ikan 1997).

Jaring arad adalah alat tangkap yang dioperasikan secara aktif dengan cara dihela oleh perahu. Dalam istilah yang sesungguhnya nama jaring arad yang semula merupakan sejenis pukat pantai atau sesuai dengan nama daerahnya merupakan jaring krakad, bundes dan dogol. Namun akhir-akhir ini nama arad juga berkembang sejalan dengan perkembangan sejenis jaring pukat yang pengoperasiannya dihela dengan menggunakan perahu (bukan kapal) disepanjang dasar perairan. Dengan perkataan lain jaring pukat hela ini dikenal dengan sebutan jaring arad (Ditjen Perikanan 1995). Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap udang dan ikan demersal.

Manadiyanto *et al.*, (2000), menjelaskan bahwa jaring arad adalah alat tangkap yang dioperasikan secara aktif dengan cara dihela oleh perahu. Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap udang dan ikan demersal. Secara garis besar konstruksi jaring arad terdiri atas bagian sayap, badan dan kantong. Bahan

jaring seluruhnya terbuat dari *polyethylene* (PE). Jaring arad ini dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring (*otter board*) berukuran panjang 66 cm dan lebar 33 cm. *Otter board* pada jaring arad ini terbuat dari bahan kayu yang diberi pemberat besi 6 kg. *Otter board* berfungsi untuk membuka mulut jaring ke arah horizontal. Desain alat tangkap jaring arad dapat dilihat pada gambar 4.

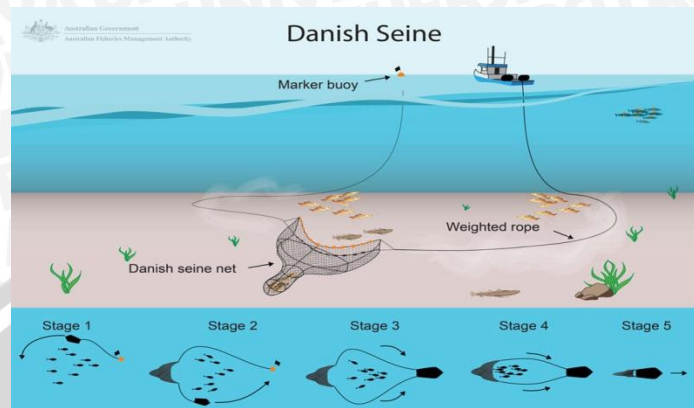


Gambar 4. Desain jaring arad

Subani dan Barus (1989), menyatakan Dogol adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring yang dibentuk berkantong untuk menampung hasil tangkapan dengan konstruksi tali selambar dan sayap yang panjang, bentuknya hampir menyerupai payang namun ukurannya lebih kecil. Alat ini termasuk dalam kelompok alat penangkapan ikan jenis pukat kantong. Terdapat sedikit perbedaan antara dogol dan cantrang yaitu pada bagian atas mulut dogol agak sedikit lebih menjorok kedepan sehingga disini ia hampir menyerupai konstruksi jaring trawl. pada dasarnya dogol terdiri dari bagian-bagian :kantong, kaki, tali-temali, pelampung dan pemberat

Dannis seine merupakan salah satu alat tangkap dengan metode penangkapannya tanpa otterboards, jaring dapat ditarik menyusuri dasar laut dengan menggunakan satu kapal. Pada saat penarikan kapal dapat ditambah

anchor seining atau tanpa ditambah *fly dragging* (Dickson, 1959). Desain Dogol dapat dilihat pada gambar 5.

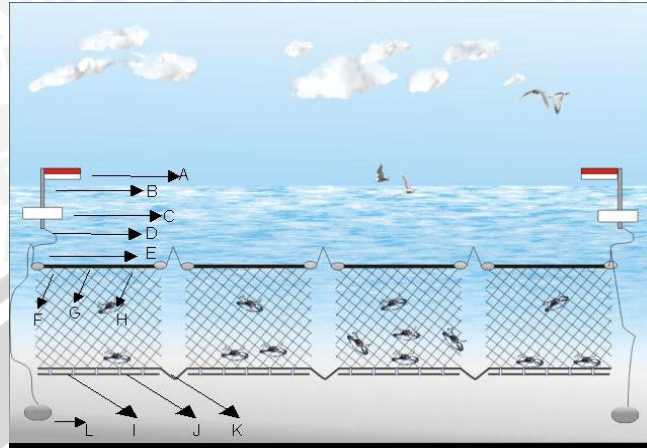


Gambar 5. Desain Jaring Dogol

Jaring rajungan merupakan jaring yang berbentuk empat persegi panjang dan terdiri atas satu lapis jaring. Bagian atas jaring dipasang tali pelampung dan tali ris atas. Sepanjang tali pelampung dilekatkan pelampung dengan jarak tertentu. Bagian bawah jaring terdapat tali ris bawah. Pemberat dipasang pada tali ris bawah dengan jarak tertentu pula (Muslim 2000). Berdasarkan klasifikasi alat penangkapan ikan, jaring rajungan diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring insang tetap yaitu jaring dasar (Suadela 2004).

Martasuganda (2008), menjelaskan bahwa jaring insang adalah salah satu dari jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring *monofilament* yang dibentuk menjadi empat persegi panjang, pada bagian atasnya dilengkapi dengan beberapa pelampung (*floats*) dan pada 6 bagian bawahnya dilengkapi dengan beberapa pemberat (*sinkers*), sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak menghadap biota perairan. Jumlah mata jaring ke arah horizontal atau ke arah *Mesh Length* (ML) jauh lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah mata jaring ke arah vertikal atau ke arah *Mesh Depth* (MD). Desain jaring rajungan dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Desain jaring rajungan

Untuk suatu penilaian terhadap suatu proyek atau unit penangkapan ikan misalnya, diperlukan analisis finansial yang penting dalam memperhitungkan insentif bagi orang-orang yang turut serta dalam menyukseskan pelaksanaan proyek. Analisis proyek ini dilihat dari sudut badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek (Kadariah *et al.* 1999).

Penerimaan usaha perikanan tangkap adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dirumuskan : $TR = Q \times P$

Keterangan : TR : *Total Revenue*

Q : *Quantity* / jumlah produk

P : Harga jual per unit produk

Total Revenue merupakan pendapatan kotor usaha yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan diperoleh dari penjualan produk akhir yang berupa uang (Primyastanto, 2006).

Biaya Usaha Perikanan tangkap dibedakan menjadi dua, yaitu, biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*). Biaya tetap umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Disisi lain biaya tidak tetap atau variabel *cost* biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi produksi yang diperoleh. Total biaya adalah jumlah dari biaya tetap dan tidak tetap (Soekarwati,1995).

Pendapatan atau keuntungan usaha perikanan tangkap adalah selisih penerimaan dan semua biaya. Keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap (Primyastanto, 2006). Keuntungan usaha ini dapat dirumuskan sbb :

$$\square = TR - TC$$

$$TC = VC + FC$$

Keterangan : \square : Keuntungan

TR : *Total Revenue*

TC : *Total Cost*

VC : *Variable Cost*

FC : *Fixed Cost*

Kriteria:

Jika total penerimaan $>$ total biaya maka usaha dikatakan untung dan layak untuk dilanjutkan

Jika total penerimaan = total biaya maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi (impas)

Jika total penerimaan $<$ total biaya maka usaha dikatakan rugi dan tidak layak untuk dilanjutkan

Bagi hasil adalah merupakan istilah yang sering dipakai orang dalam melaksanakan usaha bersama, guna mendapat keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut: Suatu perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebutkan penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil merupakan salah satu cara pengupahan yang dibayarkan atas dasar kesepakatan bersama antara pemilik kapal dan buruh nelayan dan jumlahnya berdasarkan hasil tangkapan. Hubungan antara pemilik modal dan nelayan yang berlangsung selama ini, bergerak dalam bentuk saling bergantung antara kedua belah pihak, meskipun dalam kenyataannya di berbagai komunitas nelayan memperlihatkan bahwa pihak anak buah kapal berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini terjadi karena pendapatan ABK sangat kecil (Mulyadi, 2005).

Sistem bagi hasil perikanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan yaitu nelayan pemilik dan nelayan ABK. Pendapatan nelayan umumnya tidak melalui pengupahan tetap, tetapi tergantung pada hasil produksi yang diperoleh. Sistem bagi hasil perikanan yaitu pembagian hasil penjualan ikan per trip setelah dilakukan sebagai pemotongan atas biaya BBM, ransum, dan biaya pemasaran, serta berbagai biaya lainnya atas kesepakatan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan ABK. Pendapatan yang diperoleh nelayan ABK tergantung dari jabatan (status) selama operasi penangkapan berlangsung. Bagi hasil perikanan khususnya perikanan tangkap terjadi karena adanya pemanfaatan faktor produksi dari sudut pandang nelayan pemilik dan nelayan ABK, yang pelaksanaannya menurut perbandingan tertentu dari pendapatan bersih, dimana pada usaha pancing tonda biaya ransum, ikan umpan, dan biaya variabel ditanggung secara bersama oleh pemilik dan ABK (Hehakaya, 2004).

Bagian yang dibagi dalam sistem bagi hasil ialah pendapatan setelah dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah dengan ongkos penjualan hasil termasuk ongkos eksploitasi seperti biaya reparasi, dengan demikian seluruhnya di tanggung oleh pemilik alat dan kapal (*boat*). Dalam hal ini bagi hasil, yang dibagi adalah hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Caranya adalah ikan hasil tangkapan satu unit penangkapan di jual oleh pemilik kemudian barulah dilakukan perhitungan bagi hasil. Waktu – waktu perhitungan bagi hasil juga dilakukan sebulan sekali sehingga para nelayan penggarap menerima bagiannya sekali sebulan (Mulyadi, 2005).

Konsep bagi hasil seharusnya memperhatikan optimalisasi kontrak antara juragan dan ABK. Konsep bagi hasil antara nelayan juragan dan ABK mestinya berdasarkan tingkat impas usaha (Break event point) atau waktu balik modal (payback period) sebagai alat ukur indeks proporsi tingkat bagi hasil yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengoperasian armada penangkapan setelah tercapainya PP adalah untung yang tinggal dinikmati pemilik. Hal terpenting bagi kedua belah pihak adalah kondisi simetrik (terpenuhinya informasi bagi masing-masing pihak yang bertransaksi atau melakukan kontrak usaha penangkapan) untuk memenuhi asas rasionalitas dan pareto optimal (pengukuran efisiensi dan alokasi dan distribusi pendapatan dan keuntungan usaha yang paling optimal). Dalam kondisi ideal masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap mengenai tingkat keuntungan dan kondisi usaha, maka konsep bagi hasil merupakan suatu pilihan yang optimal (first best solution). Namun tentu tak akan ada kondisi ideal karena masing-masing pihak tidak mungkin mendapatkan informasi yang sempurna mengenai kapan kembali dan berapa besar investasi dari usaha penangkapan. Ketidakefektifan ini akan meningkatkan tingkat resiko dari pihak-pihak yang melakukan kontrak. Sebagai contoh, pemilik kapal juragan) memberikan pinjaman kepada nelayan (ABK). Namun karena miskinnya informasi terkait tingkat pengembalian (expected return) dari usaha mereka, maka pihak nelayan (ABK) sangat terbuka akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Dalam sistem bagi hasil, ABK akan menghadapi beberapa masalah yang potensial, itu terjadi karena tidak sempurnanya akses informasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan usaha penangkapan. Dua masalah yang paling menonjol adalah 1) sulitnya menilai tingkat kegiatan usaha (unobservable effort), berkaitan dengan keuntungan dan BEP, 2) terbatasnya akses informasi khususnya menyangkut tingkat produktivitas usaha (hidden productivity), Kesimpulan

Konsep bagi hasil atau sering disebut PLS (profit-loss sharing) antara juragan dan nelayan (ABK) dalam usaha tangkap merupakan hal yang menguntungkan selama masing-masing pihak bertindak benar. Namun demikian, walaupun sudah lama diterapkan, system bagi hasil ini belum memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Kasus dan tiga lokasi pengamatn menjadi contoh bahwa system bagi hasil yang diterapkan masin belum memadai. Berdasarkan survey lapang, proporsi bagi hasil senantiasa tetap, dengan proporsi terbesar biasanya terletak pada juragan sebagai pemilik asset. Padahal makin lama tingkat kegunaan dari asset itu mulai berkurang. Implikasi turunya nilai asset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi tingkat efektivitas dan optimalisasi asset tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang tetap, nelayan harus bekerja lebih keras (karena pengaruh penurunan' asset). Kerja keras nelayan terse but, menu rut bagi hasil dihargai sama, pada saat baik secara teknis dan ekonomis niiai aset mulai berubah. Hasil lapang menunjukkan nilai penyusutan (depresiasi) aset (alat, mesin dan kapal) dibebankan kepada biaya kotor, tidak ditanggung juragan atau pemilik kapal. Dari sini terlihat usaha penangkapan menjadi tidak adil bagi ABK jika penurunan nilai aset tersebut ditanggung bersama antara juragan dan ABK, akibat proporsi bagi hasil yang terus sama.

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di dasari oleh, yaitu: *Pertama*, adalah kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; *Kedua*, adalah sikap spekulatif (*gambling*) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan; dan *Ketiga*, adalah hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih

tidak menentu. Sedangkan alasan dari para *juragan* yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para *juragan* berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama (Masyhuri, 1999).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berbeda pola bagi hasil di masyarakat nelayan, diantara yaitu: *Pertama*, unit atau jenis alat tangkap. Distribusi bagian atau prosentase bagi hasil perikanan tergantung pada unit atau jenis alat tangkapnya. Perbedaan bagi atau prosentase bagi hasil usaha perikanan ini dikarenakan besarnya kapasitas kapal atau perahu, jenis dan ukuran mesin yang digunakan, dan sifat atau ketahanan alat tangkap yang digunakan. *Kedua*, kemampuan dan kedudukan tenaga kerja. Kemampuan atau kedudukan tenaga kerja akan membedakan besar kecilnya bagiannya yang diterima dari bagi hasil perikanan. Misalnya, karena peran juru mudi sebagai nakhoda yang mempunyai tanggung jawab besar sebagai pimpinan rombongan nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan, sehingga juru mudi memperoleh bagian besar dari pada nelayan yang berperan sebagai juru mesin (motoris) maupun *pandega*. Begitu juga dengan bagian yang diterima oleh motoris akan lebih besar dari pada bagian yang akan diperoleh *pandega*, karena motoris mempunyai tanggung jawab terhadap mesin yang digunakan alat tangkap dan merupakan tangan kanan dari juru mudi. *Ketiga*, adat kebiasaan. Umumnya bagi hasil secara adat ini telah berlangsung secara turun temurun sehingga sering dikatakan sebagai hukum kebiasaan. Ironisnya, meski bagi hasil secara adat itu kerap merugikan nelayan penggarap, namun aturan ini tidak bisa diubah dan diperbaharui karena masyarakat nelayan sendiri menganggap bahwa aturan ini telah adil dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Hal inilah salah

satunya yang menyebabkan kenapa UU No. 16 tahun 1964 tidak berjalan, karena mendapatkan resistensi atau penolakan dari nelayan pemilik atau pemilik tambak (Kusumastanto,2005).

Sistem bagi hasil perikanan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Sistem bagi hasil sederhana dan sistem bagi hasil kompleks. Sistem bagi hasil sederhana biasanya berlaku pada kapal-kapal kecil (± 5 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 2-5 orang. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an* dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan ABK). Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL). Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL) dan biaya perawatan, mesin dan alat tangkap (PKMA), yang menghasilkan pendapatan untuk dibagi (PUD). Untuk perbaikan kapal dan mesin (docking) dan penggantian/penambahan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tidak termasuk ke dalam komponen biaya yang dipotong. Pendapatan untuk dibagi (PUD) lalu dibagi untuk juragan (merangkap nakhoda) dan ABK. Pembagian hasil ini ada yang menggunakan persentase atau point. Besarnya persentase atau point yang jatuh pada juragan atau ABK tergantung

pada kesepakatan yang telah dibuat atau yang telah berlaku di lokasi yang bersangkutan. Misalnya 60% (enam puluh persen) untuk juragan, maka $BJ=0,60 \times PUD$ dan total bagian ABK = $0,40 \times PUD$. Jika jumlah ABK adalah 5 orang, maka bagian masing-masing ABK adalah = $BA/5$. Bagian Bersih Juragan (BBJ) adalah BJ dikurangi dengan biaya administrasi (selain retribusi TPI), yang menjadi tanggungan juragan. Sistem bagi hasil kompleks biasanya berlaku pada kapal-kapal besar (> 5 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 10 orang atau lebih. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an* dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan ABK biasa) dalam jumlah yang umumnya sama. Namun dalam kasus tertentu, juragan mengambil lawuhan lebih banyak dibandingkan dengan nakhoda dan ABK. Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL). Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL), dana cadangan (DC) untuk biaya tak terduga, biaya tenaga pembantu juragan (PJ), dan bonus/intensif untuk ABK (BIA) yang terdiri dari nakhoda (BIN), ABK terampil (ABT), dan ABK biasa (BIAB). Sisanya adalah pendapatan untuk dibagi (PUD), yaitu bagian juragan (BJ) dan bagian non juragan (BNJ) dengan menggunakan persentase tertentu (misalnya bagian juragan 60% dan bagian non juragan 40%, tergantung pada

kesepakatan). Bagian Juragan (BJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih juragan (BBJ), tetapi dikurangi dengan biaya administrasi (BAD) di luar retribusi (TPI) dan intensif khusus untuk nakhoda (IKN) dan untuk ABK terampil (IKAT). Bagian non juragan (BNJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih ABK (BBA), tetapi dikurangi lebih dahulu dengan biaya acara adat (AA) seperti sesaji dan do'a, dan biaya perawatan kapal, mesin dan alat tangkap (PKMA) dengan persentase tertentu atau point (misalnya 0,5 point dari bagian non juragan (BNJ), tergantung pada kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat. Bagian Bersih Juragan (BBA), kemudian didistribusikan kepada Nakhoda (BBN), ABK Terampil (BBAT) dan ABK Biasa (BBAB) dengan menggunakan point (misalnya nakhoda 4 point, ABK Terampil 2 point per orang, dan ABK Biasa 1 point per orang) sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat. (Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB, 2002).

Tidak berjalannya pola bagi hasil sesuai Undang-undang Bagi Hasil Perikanan salah satunya diakibatkan kekuatan adat kebiasaan. Menurut Wignjodipoero (1967) adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad dan adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sementara Soekanto (2001) berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Wignjodipoero (1967) mengutip pengertian tentang hukum adat dari beberapa pakar hukum, yaitu :

- a. Prof. Dr. Supomo SH : Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dr. Sukanto : Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.
- c. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven : Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- d. Mr. J.H.P. Bellefroid : Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi masih dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- e. Prof. M.M. Djodjodigoeno SH : Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- f. Mr. B. Terhaar Bzn : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Match, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis,

bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipoero, 1967). Oleh karena itu, unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opiniojuris necessitatis*). Selanjutnya Wignjodipoero (1967) menjelaskan bahwa didalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

Sebagai pranata sosial, maka hukum adat dalam ilmu sosiologi dan antropologi atau dalam bahasa Inggrisnya *institution* adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Sementara Johnson diacu dalam Sunarto (2000) mengemukakan bahwa institusi adalah “seperangkat norma yang terinstitusionalisasi (*institutionalized*)”, yaitu (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial; (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh (*internalized*); dan (3) diwajibkan, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu. Koentjaraningrat (1981) menggabungkan klasifikasi pranata ke dalam delapan golongan dari klasifikasi Gillin (1954) dan Nadel (1953), yaitu :

- a. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu *domestic institutions*.

b. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta adalah *economic institutions*.

c. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna adalah *educational institutions*.

d. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya adalah *scientific institutions*. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya dan untuk rekreasi adalah *aesthetic and recreational institutions*. e. Prof. M.M. Djodjodigono SH : Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

f. Mr. B. Terhaar Bzn : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Match, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipoero, 1967). Oleh karena itu, unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opiniojuris necessitatis*). Selanjutnya Wignjodipoero (1967) menjelaskan bahwa didalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

Sebagai pranata sosial, maka hukum adat dalam ilmu sosiologi dan antropologi atau dalam bahasa Inggrisnya *institution* adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Sementara Johnson diacu dalam Sunarto (2000) mengemukakan bahwa institusi adalah “seperangkat norma yang terinstitusionalisasi (*institutionalized*)”, yaitu (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial; (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh (*internalized*); dan (3) diwajibkan, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu. Koentjaraningrat (1981) menggabungkan klasifikasi pranata ke dalam delapan golongan dari klasifikasi Gillin (1954) dan Nadel (1953), yaitu :

- a. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu *domestic institutions*.
- b. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi dan harta adalah *economic institutions*.

c. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna adalah *educational institutions*.

d. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya adalah *scientific institutions*. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya dan untuk rekreasi adalah *aesthetic and recreational institutions*.

e. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan dan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib adalah *religious institutions*.

f. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat adalah *political institutions*.

g. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia adalah *somatic institutions*.

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat pesisir Indonesia mengenal sistem bagi hasil perikanan secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara turun temurun dan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) menganggap pola bagi hasil tersebut sudah sangat adil. Hal ini dikarenakan, pola bagi hasil perikanan secara adat lebih mengutamakan kepada pembagian yang sama antara pemilik dan penggarap yaitu 50:50.

2.1 Landasan Teori

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang Akan diteliti, dengan sejenis penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Penelitian yang berjudul “Analisis pendapatan dan mekanisme pola sistem bagi hasil nelayan *sro’ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban”, Merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah ada dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Deni Jazuli, dengan judul “pembagian hasil nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Lamongan ditinjau dari hukum islam” didalamnya dibahas mengenai bagaimana praktik bagi hasil nelayan di Desa Weru, dan bagaimana pandangan islam terhadap bagi hasil tersebut.
2. Masyhuri, dengan judul “Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi” didalamnya dibahas mengenai bagaimana praktik bagi hasil nelayan dogon dan *purse seine* di karang agung, Tuban.
3. Skripsi Imilda Khotim, “ Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo”, dengan hasil penelitian sebagai berikut Pertama, Sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan, tidak memenuhi asas-asas Syariat Islam, masyarakat nelayan Kalibuntu menganggap, sebagai tradisi sehingga tidak dianggap sebagai persoalan dan merasa tidak perlu dipersoalkan. Kedua: Sistem kerja antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok borjuis atau para pemodal dan

kurang menguntungkan pada kelompok proletar atau nelayan buruh. Ketiga: Sistem pembagian hasil tidak memenuhi rasa keadilan, baik pemilik modal maupun pemilik perahu cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tarap ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.³

4. Skripsi Eko Wahyudi yang berjudul "*Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang hukum jual beli borongan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*" dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada pembahas tentang sistem hukum jual beli yang awalnya sistem lelang yang dilakukan oleh masyarakat Paciran akan tetapi para nelayan merasa dirugikan maka masyarakat Paciran mengubah sistem jual beli dengan sistem borongan, dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh Agama yang satu dengan tokoh agama yang lainnya.
5. Skripsi Rizky Muhartono, dengan judul "*Alternatif pola bagi hasil nelayan gillnet di muara baru jakarta utara*" penulis menyimpulkan bahwa proporsi pembagian yang dilakukan sepenuhnya sesuai kehendak pemilik kapal, hampir tidak ada peluang bagi nelayan buruh untuk meminta proporsi yang lebih adil.
6. Jurnal Danies Sadyarta Pratama, et al ,dengan judul Analisis Pendapatan Nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Menyimpulkan rata-rata pendapatan nelayan pancing ulur pada armada kapal motor Rp.5.119.444 dengan 65% pendapatan diatas

Rp.4.000.000, dan rata-rata pendapatan nelayan cungkring tanpa mesin adalah Rp 1.148.766 dengan 46,67% pendapatan berkisar 46,67% pendaapatan berkisar Rp. 1,000.000 – Rp. 1.500.000

7. Jurnal Tayyunnisa et al, dengan judul “Analisa Pendapatan dan sistem pembagian hasil nelayan jurung berdasarkan sarana dan musim, menyimpulkan Rata-rata pendapatan untuk armada nelayan dengan sarana sederhana adalah Rp 21.988,33, sedangkan untuk armada nelayan dengan sarana memadai adalah Rp. 38.128,33. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji-t didapatkan hasil bahwa ada perbedaan pendapatan pada nelayan dengan sarana sederhana dengan yang memadai dan mampu mempengaruhi pendapatan perhari dari armada nelayan. Rata-rata pendapatan untuk musim dengan ombak stabil adalah Rp 39.755,00 sedangkan untuk musim dengan ombak tidak stabil adalah Rp. 20.361,00. Berdasarkan perhitungan dengan uji-tada perbedaan pendapatan antara musim dengan ombak stabil dan tidak stabil.
8. Jurnal Ary Wahyono dengan judul “ Konflik bagi hasil tangkapan purse seine di prigi, Trenggalek, Jawa Timur, menyimpulkan Konflik bagi hasil tangkapan antara pemilik kapal (Juragan Darat) dengan nelayan buruh (ABK) adalah terkait dengan sumber pendapatan hasil tangkapan pemilik kapal yang dirasa tidak adil, karena besarnya investasi yang telah ditanamkan pada usaha perikanan *purse seine*. Tuntutan pemilik sarana tangkap untuk meninjau ulang sistem bagi hasil tangkapan sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu prinsip, bahwa setiap investor pada usaha perikanan tangkap cenderung melakukan monopoli keuntungan melalui penguasaan mesin kapal, perahu dan alat tangkap.

9. Jurnal Yonvitner, et al. Dengan judul “ Tinjauan sistem bagi hasil perikanan di beberapa lokasi pantasi utara jawa (kasus alat tangkap gillnet dan cantrang), menyimpulkan, Konsep bagi hasil atau sering disebut PLS (*profit-loss sharing*) antara juragan dan nelayan (ABK) dalam usaha tangkap merupakan hal yang menguntungkan selama masing-masing pihak bertindak benar. Namun demikian, walaupun sudah lama diterapkan, system bagi hasil ini belum memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Kasus dan tiga lokasi pengamatn menjadi contoh bahwa system bagi hasil yang diterapkan masin belum memadai
10. Jurnal Agus Sudaryanto, dengan judul “Praktik bagi hasil nelayan di kalangan nelayan pandangan wetan, Rembang, Jawa Tengah. Menyimpulkan, proses perjanjian sistem bagi hasil bukan merupakan perjanjian tertulis, hanya lewat lisan. Sistem bagi hasil kapal besar adalah *maro* (50 : 50), dan sistem bagi hasil kapl kecil *mrapat* dan *nelon*.

Pembahasan karya - karya yang telah disebutkan diatas, sebagian mempunyai kesamaan dengan persoalan yang penyusun teliti yakni mengenai kerjasama dan pembagian hasil.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami persoalan pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan mengenai persoalan yang menjadi pokok masalah, yakni tentang pendapatan nelayan dan bagi hasil di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dan juga mengenai bagaimana mekanismenya yang akan penyusun lakukan secara bertahap. Pada penguraiannya, penyusun akan memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil nelayan yang terjadi, baik menyangkut teknis pembagian maupun teknis melaut nelayan tersebut.

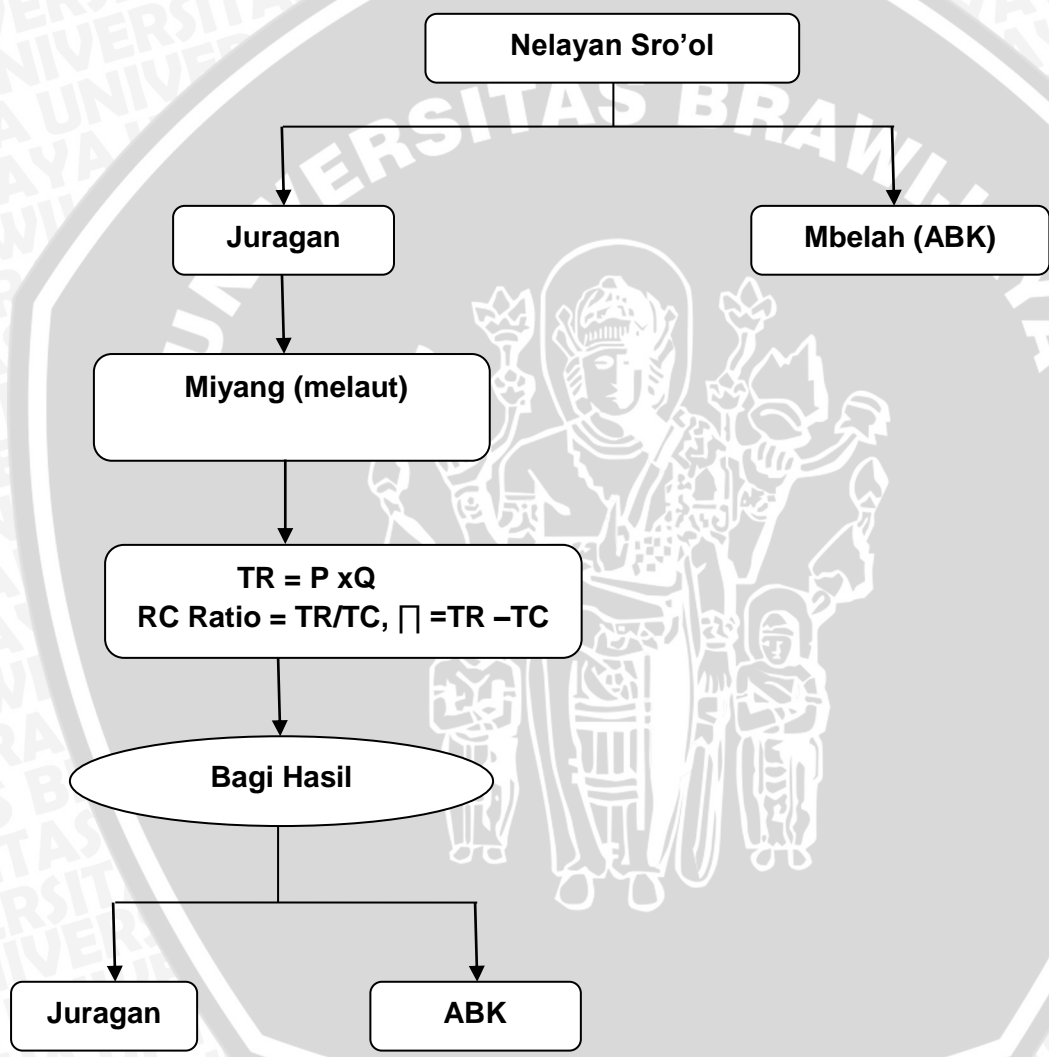
Alat tangkap yang dipergunakan adalah payang, wuwu, dogol, dan jaring arat dan jaring rajungan dan. Tenaga penggeraknya biasanya layar dan mesin tempel batangan, dan jumlah ABK bisanya 2- 4 orang. Objek penelitian adalah nelayan pemilik (juragan) dan nelayan buruh (mbelah) perahu *sro'ol*.

Kegiatan menangkap ikan dilaut (miyang) didukung oleh ketersediaan perahu, alat tangkap dan konsumsi selama melaut. Nelayan pemilik mengeluarkan biaya dalam usaha penangkapan ikan di laut yang disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan dan pemeliharaan perahu, mesin, dan alat tangkap yang dikeluarkan oleh *juragan*. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan nelayan pemilik (juragan) untuk kegiatan menangkap ikan dilaut disebut juga biaya melaut. Biaya melaut ini meliputi solar, oli, es, dan konsumsi selama melaut.

Besarnya hasil tangkapan melaut apabila dikalikan dengan harga jual akan menghasilkan penerimaan nelayan perkapal. Penerimaan antara lain dipengaruhi oleh jumlah produksi dan jenis ikan yang diperoleh karena jenis ikan berpengaruh terhadap harga jual. Besar penerimaan nelayan perkapal setelah dikurangi dengan biaya produksi akan menghasilkan pendapatan perkapal. Pendapatan perkapal ini kemudian akan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil yang ditetapkan. Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan pemilik antara lain adalah pengalaman, lama melaut, ukuran kapal, dan frekuensi melaut. Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh antara lain adalah hasil tangkapan, frekuensi melaut, lama melaut, jumlah tenaga kerja dalam satu kapal.

Hasil penerimaan dalam satu kapal yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos kemudian dibagi antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Sistem bagi hasil inilah yang merupakan pendapatan dari pemilik kapal dan anak buah kapal.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 7 Kerangka Berfikir Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2016, di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemilihan daerah ini dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi ikan laut di Tuban. Selain itu daerah itu mudah dijangkau dan latar belakang peneliti yang berasal dari daerah tersebut memudahkan penelitian.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain, komputer/*laptop*, alat tulis, kamera serta peralatan lainnya yang digunakan dalam membantu pengumpulan data dan pengolahan data.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis pendapatan dan praktek bagi hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban kemudian dianalisis dengan konsep hukum yang ditetapkan pemerintah dan menggambarkan bagaimana reaksi masyarakat terhadap sistem bagi hasil tersebut. Suryabrata (2004) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencanderaan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sementara Purhantara (2010), menjelaskan bahwa deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan

isi penelitian, sedangkan kuantitatif digunakan agar peneliti dapat menjawab permasalahan penelitian dengan benar sesuai fakta yang terdapat dilapangan.

3.4 Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini masuk dalam kategori penelitian lapangan karena data yang diambil adalah hasil pengamatan langsung di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban yang praktik pembagian hasil tangkapannya menggunakan sistem bagi hasil. Menurut Kannel D Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi, Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian *partisipant observation*, akan tetapi menurut neuman etnografi hanyalah perluasan dari penelitian lapangan. Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skal sosialkecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang ditelitinya. Secara sederhana penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan (Hadi,1985). Dengan kata lain populasi adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan Sugiyono (2006), menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2002), mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Nelayan *Sro'ol* Tambakboyo yang terlibat pada kegiatan penangkapan ikan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2011).

3.6 Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Dengan cara ini semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara ini juga sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti (Umar, 2003).

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Sedangkan Menurut Yustiarini (2008), *purposive sampling* yaitu dimana responden yang dipilih secara sengaja untuk menentukan tujuan tertentu dengan mengandalkan logika atas kaidah-kaidah yang berlaku yang didasari semata-mata dengan tujuan peneliti. *Purposive sampling* dipilih melalui pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian

dan lebih pada kehendak untuk memperoleh informasi tentang sesuatu hal melalui wawancara secara mendalam. Jadi, tidak berdasarkan proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam pengambilan sampel secara random (acak)

Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusun melakukan wawancara dengan sumber *juragan* dengan 5 alat tangkap yang berbeda yaitu, payang, wuwu, jaring arad, dogol, dan jaring rajungan yang bertujuan untuk mengetahui berapa kisaran pendapatan yang diperoleh perharinya serta bagaimana teknis bagi hasil dilakukan.

3. 7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam antara lain: wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

3.7.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya, dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman, 2006).

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Sedangkan Sunarto (2004) mendefinisikan metode observasi (pengamatan) sebagai suatu metode penelitian nonsurvei dimana peneliti mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitiannya. Sedangkan Kartono (1996) menjelaskan bahwa observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan, observasi merupakan verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati peneliti.

Menurut Suryabrata (2003), menyatakan bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat, dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Observasi juga merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat serta mengamati setiap individu atau kelompok secara langsung. Sumber data observasi dalam penelitian ini adalah Penyusun mengamati bagaimana bentuk kapal yang digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut. Ada beberapa jenis kapal yang biasa digunakan oleh Nelayan Tambakboyo untuk menangkap ikan, namun yang paling banyak digunakan yakni perahu atau kapal sro'ol atau biasa disebut sebagai perahu weron yang terbuat dari beberapa papan dan balok lunas. Ukuran pokok kapal sro'ol L.B.D $= (6,8-7,2) \times (0,6-0,75)$ meter. Jenis kayu yang digunakan biasanya kayu jati, kayu meranti dan kayu kamper. Sedangkan alat tangkap yang digunakan yaitu payang, jaring klitik, dogol, jaring gondrong dan gill net. penggunaan perahu sro'ol ini karena tidak memerlukan banyak modal serta ABK yang dibutuhkan juga tidak banyak cukup 2-4 orang saja. Nelayan Tambakboyo biasanya melaut setelah shubuh dan pulang pada waktu dhuhur atau berangkat setelah isya' dan pulang shubuh, masyarakat setempat

menyebutnya dengan Mbengi. Selain itu penyusun mengamati pula perbekalan apa saja yang dibawa nelayan dikapal ketika pergi melaut. Biasanya juragan membawakan bekal nasi dan lauk pauk, umumnya ikan dan sambal untuk dimakan ditengah laut. Penyusun juga mengamati bagaimana cara nelayan di Desa Gadon membagi tangkapan ikan. Ketika aktifitas melaut sudah selesai maka ikan yang didapat kemudian dijual, setelah juragan dan mbelah pulang ke rumah juragan untuk membersihkan diri dan menikmati cemilan ringan seperti bakwan sayur dan minuman dingin kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara *juragan* dan *mbelah* (ABK).

3.7.2 Wawancara

Menurut Purhantara (2010), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Sedangkan Kartan (1996), wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.

Wawancara menurut Nazir (1988), adalah prosedur memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Ketika melakukan wawancara, Penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur. Sugiyono, (2015) menjelaskan, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran penelitian yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek.

Wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis dari setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam melakukan wawancara penulis dapat menggunakan cara “berputar-putar baru menukik” artinya pada awal wawancara, yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan (Sugiyono, 2015).

Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan bahasa jawa kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan adalah seputar pendapatan yang diperoleh nelayan serta sistem bagi hasil apa yang dipergunakan.

3.7.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006).

Metode untuk mengkaji data sekunder yang sering dipergunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi atau perusahaan maupun perorangan (Hamidi, 2005).

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa tulisan atau gambar yang berhubungan dengan mekanisme sistem bagi hasil dan pendapatan nelayan sebagai data penunjang penelitian.

3.8 Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara secara langsung dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Untuk menghindari kesalahfahaman, maka peneliti mengklarifikasi sumber-sumber yang akan dijadikan bahan penulisan penelitian kali ini. Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini meliputi, data primer dan data sekunder.

3.8.1 Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Zuriah, 2009).

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Nagabiru, 2009). Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung.

Menurut Suryabrata (1993), mengatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya, data primer ini disebut juga data asli.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dicari adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi pada pihak Nelayan perahu *sro'ol*, baik nelayan pemilik (juragan) maupun nelayan buruh (mbelah) di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terkait pendapatan dan praktek bagi hasil nelayan.

3.8.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder di kategorikan menjadi dua yaitu: Internal data yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder dan Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan (Ruslan, 2004).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nagabiru, 2009). Sedangkan Menurut Dharma (2008), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan peneliti sebagai tangan kedua.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung namun bersifat menunjang, termasuk pengkajian literatur, hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang ada relevannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun data sekunder yaitu:

1. Mengetahui keadaan umum yang meliputi letak geografis dan topografis lokasi penelitian
2. Mengetahui keadaan penduduk daerah penelitian
3. Literatur yang di gunakan dalam penelitian (jurnal dan buku).

Data sekunder diperoleh peneliti dari :

1. Dokumentasi
2. Studi Kepustakaan

4.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menghitung kisaran pendapatan dan menjelaskan praktik bagi yang diterapkan Nelayan *sro'ol* di Desa Gadon.

Analisa deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti tentang status manusia, suatu kondisi, suatu sistem penelitian atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, aktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2011), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara,

catatan, lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari.

Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menginterpretasikan data-data melalui angka sehingga mempermudah dalam pengelolaan data mentahnya. Untuk keperluan analisis, seorang peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terstruktur. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012).

Untuk menghitung pendapatan Nelayan terlebih dahulu yang harus dilakukan yaitu menghitung biaya produksi yang dikeluarkan Nelayan dalam usaha penangkapan. Untuk menghitung biaya produksi digunakan rumus :

$TC = FC + VC$ Dimana :

$TC = Total Cost$ (biaya total)

$FC = Fixed Cost$ (biaya tetap)

$VC = Variable Cost$ (biaya tidak tetap)

Setelah biaya produksi diketahui, kemudian dapat dihitung besarnya penerimaan yang diterima Nelayan, menggunakan rumus : $TR = P \times Q$ Dimana :

$TR = Total Revenue$ (Total Penerimaan)

$P =$ Harga jual per kg

$Q =$ Jumlah barang per kg

Dan langkah terakhir untuk menghitung apakah usaha penangkapan yang dilakukan Nelayan sudah menghasilkan keuntungan atau belum digunakan

$$\text{rumus : } R/C = \frac{TR}{TC}$$

Dimana apabila,

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

Keuntungan usaha ini dapat dirumuskan sbb :

$$\square = TR - TC \quad TC = VC + FC$$

Dimana : \square : Keuntungan

TR : *Total Revenue* TC : *Total Cost*

VC : *Variable Cost* FC : *Fixed Cost*

Kriteria:

Jika total penerimaan > total biaya maka usaha dikatakan untung dan layak untuk dilanjutkan

Jika total penerimaan = total biaya maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi (impas)

Jika total penerimaan < total biaya maka usaha dikatakan rugi dan tidak layak untuk dilanjutkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada umumnya keadaan wilayah suatu wilayah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam ini yang membedakan karakteristik masyarakat suatu wilayah yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor Geografis, faktor Sosial keagamaan, faktor Ekonomi, dan faktor pendidikan . begitu pula yang terjadi di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

Manusia tidak akan pernah lepas dari sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, karena sumber daya alam akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar dan juga mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan suatu wilayah. Seperti halnya Kecamatan Tambakboyo, laut yang mengelilingi daerah tersebut memberikan masyarakatnya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

4.1.1 Kondisi Geografis

4.1.1.1 Bentang lahan Daerah Penelitian

Tuban merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Tuban berjarak sekitar 120 km dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terletak pada 111,30' – 112,35' BT dan 6,40 -7, 18' LS. Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bojonegoro, dan di Sebelah barat dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah daratan Kabupaten Tuban adalah 1.839,94 km² dengan panjang pantai 65 km dan

luas wilayah lautan sebesar 22.608 km². Kabupaten Tuban mempunyai 20 Kecamatan, dimana salah satunya adalah kecamatan Tambakboyo yang menjadi wilayah penelitian penulis.

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang terletak di pesisir pantai utara Jawa, terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan dan 111 bujur timur. sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jenu, sebelah selatan Kecamatan Kerek, dan sebelah barat Kecamatan Bancar. Luas wilayah Kecamatan Tambakboyo 72,97 km², secara administrasi kecamatan Tambakboyo terbagi menjadi 18 Desa, 42 Dusun, 63 RW, dan 217 RT.

4.1.1.2 Batas – batas Wilayah

Wilayah Kecamatan Tambakboyo sendiri terletak di pesisir pantai utara Jawa, sehingga sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hasil laut dari itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka tiap harinya baik sebagai nelayan maupun juga menjual berbagai hasil olahan ikan. Topografi wilayah Tambakboyo sendiri adalah rendah dan suhu udara rata-rata 36°C. Berdasarkan orbitasinya, Kecamatan Tambakboyo dapat ditempuh dari pusat kota pemerintahan kurang lebih 40 menit ke arah barat dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam (Monografi Kecamatan Tambakboyo, 2016).

4.1.1.3 Kondisi Infrastruktur

Secara umum sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah Kecamatan Tambakboyo cukup bagus. Jalan –jalan yang terdapat di sekitar Desa sudah di paving, jaringan listrik dan telekomunikasi sudah merata. Potensi sumberdaya perikanan di Wilayah ini adalah ikan, cumi, rajungan, ubur-ubur,

udang rebon dll., sedangkan untuk hasil olahannya antara lain kerupuk ikan, rengginang ikan ,petis, ikan asin serta terasi.

4.1.2 Kondisi Demografis

4.1.2.1 Pemerintahan

Saat ini Camat Tambakboyo dijabat oleh Drs. Erksamni. Kecamatan Tambakboyo mempunyai 18 Desa menjadi 18 Desa, yaitu 42 Dusun, 63 RW, dan 217 RT. Sedangkan kantor Kecamatanya terletak di Desa Tambakboyo Kabupaten Tuban. Salah satu yang Desa pesisir di Tambakboyo adalah Desa Gadon yang menjadi sentral lokasi penelitian. Saat ini Kepala Desa Gadon dijabat oleh ibu Hj. Aminatun.

4.1.2.2 Kependudukan dan mata pencaharian

Menurut Rusli (1995) penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selain itu Rusli juga menjelaskan bahwa komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama seperti etnis, agama, kewarganegaraan, bahasa, pendidikan, jenis kelamin, dan golongan pendapatan.

Berdasarkan data monografi Desa Gadon tahun 2016, jumlah total keseluruhan penduduk yang tinggal di Desa Gadon adalah 1625 jiwa, dengan jumlah laki-laki 841 Jiwa dan jumlah perempuan 784 Jiwa.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo adalah usaha menangkap ikan di laut (nelayan), sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap perairan laut

sangat tinggi. Sekitar 86% mata pencaharian tetap masyarakat Desa Gadon adalah usaha menangkap ikan di laut (nelayan), dan sekitar 3,87% Wiraswasta 1,29% Tani, 0,86%, TNI dan Polri, 7,7%, Pegawai Negeri, Dan pekerjaan yang lain 6,27%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 . Jenis Mata Pencaharian di Desa Gadon

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Nelayan	1400	86,1%
2.	Wiraswasta	63	3,87%
3.	Tani	21	1,29%
5.	TNI dan POLRI	14	0,86%
6.	Pegawai Negeri	25	7,7%
7.	Dan lain-lain	102	6,27%
	Jumlah	1625	100%

Sumber : Monografi Desa Gadon, (2016).

Pekerjaan menangkap ikan atau *miyang* di Desa Gadon merupakan pekerjaan yang sudah dilakukan turun temurun, sebagian besar penduduk Desa Gadon tidak mempunyai ketrampilan lain selain melaut sehingga menjadi nelayan banyak dipilih oleh masyarakat.

Sedangkan untuk mayoritas agama di Desa Gadon yaitu dominan memeluk agama Islam dengan jumlah persentase mencapai 99% dan sisanya untuk beragama Protestan dan Katholik.

4.1.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi manusia guna menunjang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, pendidikan merupakan faktor utama yang amat mendukung terciptanya pendidikan masyarakat yang dinamis, berguna pada pembangunan

sumberdaya manusia yang lebih baik. Adapun tingkat pendidikan desa Gadon tercatat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2 . Tingkat pendidikan Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase %
1.	Usia 10 tahun keatas yang buta huruf	0	0
2.	Tidak Tamat SD	225	13,8
3.	Tamat SD	400	24,6
5.	Tamat SMP	300	18,4
6.	Tamat SMA	600	37
7.	Tamat Perguruan Tinggi	100	6,1
	Jumlah	1625	100%

Sumber : Monografi Desa Gadon, (2016).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Gadon cukup baik karena jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah jumlahnya jauh lebih sedikit dengan penduduk yang mengenyam pendidikan.

Sarana Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, salah satunya adalah gedung tempat belajar mengajar, tidak mungkin proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik jika gedung atau tempat dimana guru dan murid melakukan kegiatan pendidikan tidak ada. Tercatat pada tahun 2016 di Kecamatan Tambakboyo terdapat 29 sekolah menurut tingkat pendidikan dibagi sebagai berikut : a). SD , terdapat 26 sekolah dasar negeri yang memiliki 55 bangunan gedung dan 161 ruang kelas b). SMP, terdapat 2 sekolaah lanjutan tingkat pertama mempunyaai 7 bangunan gedung dan 58 ruang kelas, c).SMA, terdapat satu sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki dua bangunan gedung dan 48 ruang kelas, d). SMK, terdapat 2 sekolah SMK yang terdiri dari 4 gedung dan 12 ruang kelas.

Di Kecamatan Tambakboyo memang tidak terdapat Perguruan tinggi, namun terdapat perguruan tinggi yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor seperti Universitas Ronggolawe Tuban (UNIROW) yang banyak menjadi pilihan masyarakat Kecamatan Tambakboyo, serta sekolah tinggi lain di Kabupaten Tuban.

4.1.2.4 Keadaan Sosial Budaya

Pada umumnya setiap daerah atau wilayah mempunyai kebudayaan atau tradisi tersendiri dengan tujuan membuat hidup masyarakatnya menjadi lebih baik serta untuk melestarikan budaya warisan nenek moyang. Seperti pendapat Kihajar Dewantara yang mengatakan bahwa dalam setiap kehidupan masyarakat dengan berbagai interaksi sosial yang ada, maka memunculkan suatu kebudayaan yang merupakan keseluruhan dari kompleksitas yang tertentu dalam sejarah dan diteruskan dari suatu generasi, ke generasi berikutnya. Adapun yang termasuk dari tradisi dan kebudayaan itu berupa organisasi sosial, ekonomi, kepercayaan adat atau seni. Pada hakikatnya seluruh kompleksitas dari kebudayaan itu merupakan keseluruhan dalam budi dalam keharmonisan.

Korl-Edimudds mengatakan bahwa kebudayaan yang sering muncul dalam suatu realitas sosial yang ada itu bersifat statis dan ada yang bersifat dinamis. Sifat statis yang ada pada suatu kebudayaan ditandai dengan adanya warisan budaya yang diterima secara turun temurun, atau dari agama sehingga memberi identitas tertentu. Sedangkan sifat dinamis kebudayaan itu muncul bila manusia berusaha secara terus menerus menggungkapkan pengalaman hidup dalam berbagai karya seni dan kebudayaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas kebudayaan atau tradisi menangkaap ikan yang ada di Desa Gadon merupakan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang.

Untuk menunjang kegiatan dan kebutuhan masyarakat, di desa Gadon memiliki sarana sosial diantaranya, 1 polindes, 2 masjid dan 20 musholha 1 lapangan bola, 1 lapangan volly dan 1 lapangan bulu tangkis. Adapun kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti oleh penduduk, diantaranya : Karang Taruna, PKK dan Pengajian.

4.1.2 Kondisi Perikanan

Untuk potensi perikanan wilayah Kecamatan Tambakboyo untuk sektor perikanan tangkap mencapai 18 kg/bulan atau 133.928 ton/tahun, dengan nilai 711.000.000 pertahun. untuk olahan mencapai 1199, 4 ton/tahun, budidaya mencapai 66.25 ton/tahun, dan untuk produk jadi perikanan mencapai 175,85 ton/tahun. Potensi perikanan tersebut termasuk tertinggi dari kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Tuban (BPS Kab Tuban, 2016).

Potensi perikanan yang dimiliki Desa Gadon diantaranya : penangkapan, pengeringan ikan, budidaya ikan, pembuatan kerupuk ikan, rengginang ikan serta terasi. Jumlah Nelayan di Desa Gadon sebesar 86% dari total penduduk atau sekitar 1400 orang. Perahu *sro'ol* paling mendominasi yaitu sekitar 85 % dari keseluruhan armada nelayan di Desa Gadon, sisanya yakni sebesar 15 % adalah perahu *purse seine*. Jumlah alat tangkap yang digunakan di Desa Gadon ada beberapa macam, diantaranya adalah purse seine, dogol, payang bondet, wuwu rajungan, jaring rajungan, serok ubur-ubur, jaring arad, pancing dll. sedangkan jenis ikan yang ditangkap selar, tongkol, tengiri, juwi, dorang, kembung, layur, cumi-cumi, teri nasi dll.

4.2 Karakteristik Nelayan Responden

Kecamatan Tambakboyo yang menjadi objek penelitian memiliki luas areal 72,97 km² dengan topografi pantai. Bentang wilayah pantai yang cukup luas dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pencaharian.

Penelitian ini memfokuskan bahasan pada nelayan tradisional *sro'ol* sebagai subjek yang diteliti. Kusnadi (2003: 85) menyatakan bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha kecil, dan organisasi penangkapan sederhana. Lebih tegasnya, ciri-ciri nelayan tradisional adalah: 1) Teknologi penangkapan sederhana dengan ukuran perahu kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkau alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-Pk kecil; 2) Besaran modal usaha besar; 3) Jumlah anggota organisasi penangkapan antara 2-3 orang dengan pembagian peran bersifat kolektif atau nonspesifik dan umumnya berbasis keluarga, tetangga, atau teman dekat; 4) Orientasi ekonomisnya diarahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Lebih khusus lagi, nelayan tradisional *sro'ol* yang diteliti terdiri dari nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang, dogol, wuwu, jaring rajungan, dan jaring arad. Nelayan sampel diambil sebanyak 32 orang. Karakteristik nelayan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3 jumlah Nelayan Responden Menurut Umur

Umur (tahun)	Jumlah	Prosentase(%)
> 30	3	9,37
30 - 40	11	34,37
41-50	11	34,37
< 50	7	21,87
Total	32	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 22 orang nelayan responden di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo pada umumnya pada usia 30-40 tahun yakni sebanyak 11 jiwa atau 34,37 %, dan pada usia 41- 50 tahun sebanyak 11 jiwa atau 34,37 % . Jumlah nelayan terkecil berada pada kelompok umur > 30 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 9,37%.

Tabel 4 . Jumlah Nelayan Responden Menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
Tamat SD	14	43,75
Tamat SMP	11	34,37
Tamat SMA	7	21,87
Total	32	100

Sumber : Data Primer, (2016).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 32 nelayan responden di Kecamatan Tambakboyo yang dominan adalah tamat SD yaitu sebanyak 14 orang atau 43,75%. Jumlah terkecil berada pada kelompok tingkat pendidikan tamat SMA yang berjumlah 7 orang atau 21,87%, sedangkan sisanya 34,37% adalah kelompok nelayan dengan tingkat pendidikan tamat SMP.

Tabel 5. Jumlah Nelayan Responden Menurut Pengalaman

Pengalaman Nelayan (thn)	Jumlah	Prosentase %
> 15	7	21,87
15-30	25	78,13
31-45	2	6,25
	32	100

Sumber : Data Primer, (2016).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 32 orang nelayan responden yang paling dominan adalah 15-30 tahun yakni sebesar 78,13%. Pengalaman nelayan terendah berada pada kelompok 31-45 tahun sebanyak 2

orang atau 6,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berada di daerah penelitian telah mempunyai pengalaman yang cukup lama sebagai nelayan.

4.2.1 Teknologi Penangkapan dan Sarana Produksi

Perahu *sro'ol* yang beroperasi di Desa Gadon umumnya terbuat dari kayu jati. Harga jual perahu rata-rata berkisar antara Rp15.000.000,00 - Rp17.000.000,00 untuk perahu baru dan Rp 4.000.000,00 - Rp7.500.000,00 untuk perahu bekas atau *second*.

Perbaikan perahu dilakukan selama 3 - 4 bulan sekali dengan biaya sebesar Rp 200.000,00 – Rp 300.000,00. Perbaikan meliputi pengecatan, penambalan perahu yang rusak, dan rehabilitasi kerusakan ringan. Perbaikan perahu secara keseluruhan hingga penggantian rangka kapal dilakukan selama lima tahun sekali dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 1.000.000,00. Perbaikan kapal atau sering disebut *didok* berlangsung selama empat hari.

Perahu *sro'ol* umumnya berukuran panjang 6-7 meter dan lebar 2,5-3 meter dan tinggi 1,5-2 meter. Perahu yang dioperasikan oleh 3 - 5 orang ini dilengkapi 1 mesin berkapasitas 16-22 Pk. Perahu *sro'ol* di desa Gadon menggunakan alat tangkap jaring rajungan, wuwu, payang, jaring arad, dan dogol.

Jaring rajungan merupakan salah satu alat tangkap di Desa Gadon yang digunakan untuk menangkap rajungan di laut. Berdasarkan metode pengoperasiannya, jaring rajungan diklasifikasikan ke dalam jaring insang dasar (*set bottom single gillnet*).

Jaring rajungan terbuat dari senar putih yang berukuran 5 inchi. Jaring dilengkapi tali ris atas dan tali ris bawah, pelampung yang terbuat dari timah

sebagai pemberat, serta pelampung sebagai tanda kepemilikan. Harga jaring siap pakai berkisar antara Rp150.000,00 hingga Rp250.000,00 per pis.

Daya tahan jaring hanya mencapai umur 1-1,5 bulan karena terbuat dari tali senar yang sangat tipis. Jaring rentan terhadap kerusakan terutama karena gigitan Rajungan dan Kepiting yang terjatuh ke jaring. Perbaikan jaring yang rusak dilakukan nelayan setelah selesai melaut. Tak jarang perbaikan jaring dilakukan di rumah ketika nelayan pulang ke rumah masing-masing. Dalam memperbaiki jaring nelayan biasanya dibantu oleh isteri dan anak-anaknya.

Secara umum, jaring rajungan yang dioperasikan di Desa Gadon, terdiri dari : (1) Badan jaring Badan jaring rajungan umumnya terbuat dari PA *monofilament* dengan warna putih transparan dan memiliki diameter benang 0,3 mm. Dengan ukuran mata jaring sebesar 4 inci, jaring ini dapat menangkap rajungan. Morfologi rajungan yang memiliki capit membuat proses pelepasan rajungan dari jaring cenderung merusak jaring, sehingga badan jaring mengalami pergantian setiap sebulan sekali. Selain badan jaring, umur teknis bagian-bagian jaring lainnya mencapai 2 tahun.

(2) Tali ris pada jaring rajungan terbagi menjadi tali ris atas dan tali ris bawah. Tali ris yang memiliki arah pilinan Z tersebut berfungsi untuk memasang atau menggantungkan badan jaring. Kedua tali ini terbuat dari PE *multifilament* dengan diameter 3 mm. Tali ris atas dipasang di bawah tali pelampung, sedangkan tali ris bawah dipasang di atas tali pemberat. Tali ris 52 atas dan bawah memiliki panjang yang sama untuk 1 *piece* yaitu 200 m.

(3) Pelampung dan tali pelampung Pelampung yang digunakan jaring rajungan di Desa Gadon terbuat dari karet sandal berbentuk bulat dengan diameter 5 cm. Dalam 1 *piece* jaring, dipasang 70 buah pelampung dengan jarak antar

pelampung yaitu 1,5 m. Tali pelampung berbahan sama dengan tali ris yaitu PE *multifilament* dengan diameter yang berbeda sebesar 2,5 mm dan arah pilinan S. Tali pelampung yang dibutuhkan sepanjang 1.000 m untuk 5 *piece* jaring.

(4) Pemberat dan tali pemberat Jaring rajungan menggunakan pemberat berbahan timah hitam berbentuk *elips* dengan panjang 1,5 cm dan diameter 0,5 cm. Satu pemberat memiliki bobot 1,8 gram dan untuk 1 *piece* jaring rajungan dibutuhkan pemberat timah dengan bobot total 3 kg. Pemasangan pemberat pada tali pemberat sepanjang 200 m berjarak 20 cm. Tali pemberat berbahan dan berdiameter sama dengan tali pelampung yaitu PE *multifilament* dengan diameter 2,5 mm.

(5) Pelampung tanda dan tali pelampung tanda Pelampung tanda yang digunakan di Desa Gadon terbuat dari *styrofoam* dengan batang bambu di bagian tengahnya. *Styrofoam* dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 30 cm dipasang tepat di bagian tengah bambu yang memiliki panjang 2 m. Biasanya di bagian atas bambu dengan panjang 2 m dan diameter 5 cm dipasang bendera sedangkan di bagian bawah dipasang tali pelampung tanda yang terbuat dari PE *multifilament* dengan diameter 0,6 cm dan memiliki arah pilinan Z. Tali pelampung yang digunakan sepanjang 25 m. Pelampung tanda berfungsi sebagai penanda lokasi dipasangnya jaring rajungan di laut.

(6) Pemberat tambahan Jaring rajungan di PPP Karangantu menggunakan pemberat tambahan berupa batu seberat 3,5 kg. Batu diikatkan pada tali pelampung tanda sepanjang 5 m sehingga tali pelampung tanda tersebut menjadi 30 m. Pemberat tambahan tersebut berfungsi membuat jaring rajungan lebih melengkung saat *setting* di laut dan tidak menetap pada satu lokasi dikarenakan bergerak secara perlahan yang disebabkan oleh arus. Penggunaan

pemberat tambahan tersebut disesuaikan dengan tingkah laku rajungan yang apabila terkejut akan terjatuh pada jaring. Jaring rajungan di Desa Gadon biasanya terdiri atas 5 *piece* jaring dimana 1 *piece* dari jaring tersebut memiliki panjang 200 m dan lebar 0,75 cm. Satu orang nelayan biasanya membawa 3 set jaring rajungan untuk satu kali operasi penangkapan rajungan. Gambar jaring rajungan yang digunakan di Desa Gadon dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Jaring Rajungan

wuwu berbentuk persegi panjang, disusun oleh rangka yang terbuat dari besi, dan dilengkapi dengan jaring *Nylon* yang berwarna sebagai penutup/tubuh rangka, serta pelampung sebagai tanda kepemilikan. Tidak seperti jaring yang mudah rusak, wuwu memiliki daya tahan mencapai 5-6 bulan sehingga sepulang melaut nelayan tidak perlu repot memperbaiki wuwu. Kerusakan wuwu biasanya terjadi karena rangka besi mengalami karat dan patah.

Wuwu yang digunakan di Desa Gadon termasuk dalam jenis alat tangkap *traps* yang sifatnya sebagai penghalang termasuk perangkap kotak (*box trap*), yang berbentuk 3 dimensi dan dilengkapi dengan penghalang termasuk perangkap berangka besi. Menurut cara operasinya alat tangkap ini termasuk

bubu dasar (*ground fish pots*) yaitu bubu yang daerah operasinya berada di dasar perairan.

Wuwu rajungan atau wuwu adalah sebutan nelayan setempat karena sasaran tangkapannya yaitu rajungan (*portunus pelagius*), nama sebenarnya alat ini adalah wuwu lipat, karena wuwu ini merupakan pengembangan dari konstruksi wuwu yang awalnya tetap. Wuwu jenis ini terbuat dari jaring dengan rangka besi dengan rancangan yang dapat dilipat atau dikndurkan. Keuntungannya adalah wuwu dapat dengan mudah diangkut dalam perahu dalam jumlah besar, sehingga pengangkutan ke *fishing ground* lebih efisien.

Konstruksi wuwu rajungan terdiri dari beberapa bagian antara lain :

1. badan wuwu yang terdiri dari : jaring bagian samping yang terbuat dari PE dengan diameter 1mm dan panjang 48cm, jaring bagian atas yang terbuat dari PE dengan diameter 1mm dan panjang 48cm, jaring bagian saluran masuk yang terbuat dari PE dengan diameter 1mm dan panjang 17cm, jaring bagian bawah yang terbuat dari bahan PE dengan diameter 1mm dan panjang 48cm .
1. kerangka yang terbuat dari bahan besi dengan diameter 4mm
2. mulut atau inep-inep, terbuat dari bahan PE dengan diameter 1mm dan panjang 17cm
3. Penjepit yang terbuat dari bahan besi dengan panjang 9cm dan diameter 3mm
4. Pintu pengambilan hasil tangkapan
5. Penusuk umpan

6. Tali, terdiri dari tali utama yang terbuat dari bahan PE dengan diameter 4mm dan panjang 4km, serta tali cabang yang terbuat dari bahan PE dengan diameter 4mm, panjang 3m dan jarak 10m.
7. Pemberat, terdiri dari pemberat besar dari 2 batu dengan berat 5 kg dan pemberat kecil dari 11 batu dengan berat 2.5 kg.
8. Pelampung yang terbuat dari gabus sebanyak 11 buah
9. Kayu Penegak sebanyak 11 buah dengan ukuran 1,9 m.
10. Penanda yang terbuat dari kain berwarna warni



Gambar 9 Wuwu Lipat

Payang yang digunakan di Desa Gadon dapat diklasifikasikan sebagai payang bondet. Ukuran *mesh size* yang digunakan pada alat tangkap payang payang bondet yaitu 0,5 cm. Ukuran panjang alat tangkap payang bondet lebih kecil daripada payang ampera dan payang. Alat tangkap ini terdiri atas sayap, badan jaring, kantong, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung dan pemberat.

Secara umum jaring arad hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu sayap (*wing*) dibagian depan. Badan (*belly*) dibagian tengah dan kantong (*codend*) dibagian belakang. Tetapi bagian-bagian tersebut memiliki sub-bagian lagi. (Ditjen Perikanan, 1995), untuk selengkapnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sayap (*wing*) Sayap disebut juga jaring pengarah yang merupakan perpanjangan badan jaring ke *otter board*. Sayap terdiri atas sayap kanan dan sayap kiri, masing-masing terdiri atas sayap atas (*upper wing*) dan sayap bawah (*lower wing*). Kedua sayap membentuk mulut jaring yang terdiri atas mulut atas (*head line*) yang diikatkan tali ris atas (*head rope*) sebagai tempat pelampung dan mulut bawah (*ground line*) yang diikatkan tali ris bawah (*ground rope*) yang diberikan pemberat.

2. Badan jaring (*belly*) Badan jaring adalah bagian tengah jaring arad yang terbesar dari keseluruhan alat tangkap yang berfungsi untuk mengurung objek yang telah digiring oleh sayap. Pada sudut depan kiri dan kanan berhubungan dengan sayap kanan dan sayap kiri, sedang bagian belakang badan berhubungan langsung dengan bagian kantong.

3. Kantong jaring (*cod end*) Kantong berfungsi sebagai tempat terkumpulnya hasil tangkapan sehingga setelah kantong diikat maka objek tangkapan yang telah berada di dalam kantong tidak akan dapat melarikan diri. Bahan jaring seluruhnya terbuat dari *polyethylene* (PE).

4. Papan rentang (*otter board*) Papan rentang (*otter board*) merupakan pengganti peran *danleno* dan *beam* sehingga kedua sayap jaring terbuka kekanan dan kekiri. Ukuran *otter board* ini tidak lebih dari 40 cm x 80 cm dan diberi pemberat besi 6 kg. Dengan penggunaan *otter board* ini tali segitiga tidak diperlukan lagi.

5. Tali ris atas (*head rope*) Tali ris yang dipergunakan untuk menggantungkan dan menghubungkan kedua sayap jaring melalui mulut bagian atas.
6. Tali ris bawah (*ground rope*) Tali yang dipergunakan untuk menggantungkan dan menghubungkan kedua sayap jaring bagian bawah melalui mulut bagian bawah.
7. Tali selambar (*warp rope*) Tali yang berfungsi sebagai penghela jaring arad di belakang kapal yang sedang berjalan dan penarik jaring arad ke atas geladak kapal.
8. Pelampung (*float*) Pelampung digunakan untuk membantu membuka mulut jaring ke arah atas.
9. Pemberat (*sinker*) Pemberat berfungsi untuk membuka mulut jaring ke arah bawah.

4.2.2 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan

Operasi penangkapan atau *miyang* dalam bahasa masyarakat setempat yang dilakukan di Desa Gadon, yaitu para nelayan *sro'ol* yang terdiri dari *juragan* dan *mbelah* pergi melaut mulai dari shubuh sampai dhuhur atau isya' sampai shubuh, biasa disebut *mbengi* dalam istilah setempat. Nelayan *sro'ol* hanya melakukan penangkapan di wilayah sekitar dan hanya sesekali andon atau *amen* ke daerah lain. Sepulangnya dari melaut, hasil tangkapan langsung dijual ke TPI atau pengepul dan bagi hasil dilakukan setelahnya di rumah *juragan*.

Setiap perahu memiliki jadwal operasi dan cara penangkapan yang berbeda-beda. Saat beroperasi perahu-perahu dilengkapi dengan lampu penerang, senter, atau bendera. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keberadaan kapal dapat diidentifikasi oleh perahu lain sehingga tidak terjadi tabrakan.

4.2.2.1 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan Jaring Rajungan

Nelayan jaring Rajungan berangkat melaut pada pagi hari sekitar pukul 05.00 dan pulang antara pukul 11.00-01.00 Wib. Biasanya pada sore hari pukul 16.00 nelayan jaring pergi melaut untuk menebar jaring kemudian pada pukul 05.00 esok harinya nelayan kembali ke laut untuk mengangkat jaring dan mengambil Rajungan yang tertangkap. Cara seperti ini lazim disebut masyarakat Desa Gadon dengan sebutan *Mbasang*. Jaring dioperasikan di daerah permukaan perairan. Dalam mengoperasikan jaring, nelayan tidak memerlukan umpan apapun. Nelayan hanya menebarkan jaring dan Rajungan akan tersangkut dengan sendirinya karena terbawa arus laut.

Tahap persiapan yang dilakukan di *fishing base* sebelum berangkat ke *fishing ground* meliputi persiapan alat tangkap, persiapan perbekalan, dan pemeriksaan keadaan perahu serta mesin. Perbekalan yang dibutuhkan meliputi makanan dan minuman. Mesin perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan jaring rajungan adalah *outboard*, sehingga pada umumnya nelayan membawa solar sebanyak 3 liter menggunakan jerigen untuk satu kali trip. Setelah tahap persiapan selesai, nelayan jaring rajungan berangkat menuju *fishing ground* yang umumnya dilakukan pada pukul 05.00 WIB. Berdasarkan pada kebiasaan dan pengalaman, nelayan jaring rajungan dapat mengenali daerah-daerah penangkapan rajungan tersebut. Ketika akan tiba di *fishing ground*, nelayan mulai mempersiapkan jaring rajungan beserta pelampung tanda dan pemberat tambahannya. Sebelumnya, pemberat tambahan yang berupa batu telah diikatkan pada tali pelampung tanda sehingga nelayan hanya perlu mengikatkan tali tersebut pada tali ris atas jaring rajungan. Selama penurunan jaring, laju kapal dikurangi dan dipastikan tidak ada pelampung tanda di wilayah tersebut. Penurunan jaring rajungan rata-rata memerlukan waktu 5 menit dan

dilakukan oleh 3 orang nelayan yang saling membantu secara bergantian dan 1 orang sebagai juru mudi. Proses penurunan diawali dengan menurunkan batu pemberat, kemudian pelampung tanda pertama diikuti dengan jaring dari *piece* pertama hingga *piece* terakhir selanjutnya diakhiri dengan pelampung tanda kedua dan batu pemberat. Pembagian kerja dari ketiga nelayan tersebut adalah satu orang nelayan bertugas menurunkan batu pemberat dan pelampung tanda pertama, satu orang nelayan bertugas menurunkan jaring dan juga memastikan jaring tersebut tidak terbelit saat diturunkan, dan satu orang nelayan bertugas menurunkan batu pemberat dan pelampung tanda kedua. Batu pemberat akan membuat jaring rajungan lebih melengkung, sehingga sesuai dengan tingkah laku rajungan jika rajungan terkejut maka akan terjatuh pada jaring. Setelah proses *setting*, dilakukan proses penghanyutan jaring kira-kira selama semalam. Selama menunggu proses *drifting*, nelayan melakukan proses *setting* beberapa jaring lainnya di lokasi yang berbeda namun tidak terlalu jauh dari lokasi awal. Setelah semua jaring rajungan yang dibawa di *setting*, selanjutnya dilakukan penarikan jaring rajungan yang telah dipasang sehari sebelumnya, mulai dari jaring yang pertama kali di *setting*. Penarikan jaring rajungan umumnya diperlukan waktu 0,5 jam. Proses *hauling* diawali dengan mengangkat pelampung tanda dan batu pemberat pertama disusul badan jaring hingga akhirnya pelampung tanda dan batu pemberat terakhir. Pelampung tanda dan batu pemberat dilepaskan dari jaring kemudian jaring dengan hasil tangkapan yang masih terjatuh dibungkus dengan jaring waring menyerupai kantong. Pelepasan hasil tangkapan tidak dilakukan di atas perahu. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu karena jaring rajungan yang dioperasikan lebih dari satu. Setelah semua jaring rajungan di angkat, nelayan menuju *fishing base* dan biasanya tiba pukul 11.00 – 13.00 WIB. Di *fishing base*, nelayan melakukan pelepasan sekaligus penyortiran hasil tangkapan.

4.2.2.2 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan Wuwu

Penangkapan rajungan menggunakan wuwu di Desa Gadon dilakukan secara harian (one day fishing). Nelayan berangkat pagi sekitar pukul 05.00 dan pulang siang antara pukul 11.00 – 01.00 Wib. Jumlah tenaga yang dibutuhkan 3-5 orang. wuwu dioperasikan di dasar perairan. Dalam mengoperasikan wuwu, nelayan membutuhkan umpan sebagai penarik Rajungan agar mau memasuki wuwu.

Pengoperasian wuwu dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahap persiapan, penurunan wuwu, perendaman (*immersing*) dan penarikan (*hauling*). Tahap persiapan antara lain persiapan bahan bakar, pengecekan mesin, perbekalan makanan, es, air tawar dan umpan. Umpan dipasang yaitu ikan petek (*Leiognathus sp*) kering. Setiap wuwu dipasang umpan 1-2 ikan tergantung ukuran ikan. Kepala ikan dikaitkan atau ditusukkan ke pengait yang ada dalam wuwu lipat. Wuwu yang sudah dipasangi umpan disusun di bagian tengah atau belakang perahu. Penurunan wuwu dimulai dengan pencarian fishing ground yang hanya berdasarkan insting dan pengalaman sehari-hari, kemudian wuwu diturunkan satu persatu. Tahap selanjutnya yaitu perendaman, yang dilakukan selama 24 jam. Tahap yang terakhir yaitu penarikan, yang dimulai dengan menarik pemberat kemudian baru wuwunya. Setelah wuwu terangkat ke atas perahu kemudian dibuka dan diambil hasil tangkapannya. Rajungan yang didapat kemudian disimpan di basket. Terakhir yaitu melakukan setting wuwu untuk direndam dalam perairan dan diambil esok hari.

4.2.2.3 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan Payang

Proses pengoperasian payang di Desa Gadon dilakukan secara harian (*one day fishing*). Nelayan berangkat menuju lokasi penangkapan (*fishing ground*) sekitar pukul 05.00 pagi hari untuk payang. Waktu yang dibutuhkan menuju *fishing ground* sekitar 1 - 2 jam tergantung jarak yang ditempuh.

Penggunaan tenaga pada alat tangkap payang berkisar antara 6 orang untuk payang berukuran kecil dan 16 orang untuk payang berukuran besar (Subani & Barus, 1989). Pengoperasian payang dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap persiapan, penentuan *fishing ground*, penurunan jaring (*setting*) dan pengangkatan jaring (*hauling*). Tahap persiapan antara lain persiapan bahan bakar, pengecekan mesin, perbekalan makanan, es, air tawar dan keperluan melaut lainnya. Penurunan jaring dimulai dengan menurunkan pelampung tanda, diikuti tali selambar kanan, kemudian sayap kanan dan badan jaring dimana ujung tali selambar kanan masih tetap berada pada perahu. Saat penurunan sayap, nelayan lain melemparkan pemberat dan pelampung secara berurutan agar tidak terbelit dengan jaring. Selanjutnya dilakukan penurunan kantong dan sayap kiri sampai bertemu dengan pelampung tanda awal. Waktu yang dibutuhkan untuk *setting* adalah 20 - 30 menit. Ketika gerombolan ikan diperkirakan sudah masuk ke dalam kantong, selanjutnya dilakukan tahap *hauling*. Tahap ini dimulai dengan pengangkatan sayap kiri dan sayap kanan secara bersamaan. Saat proses *hauling* diusahakan posisi kantong berada di tengah. Pengangkatan jaring dilakukan secara perlahan, setelah sampai badan jaring pengangkatan jaring dipercepat. Hal ini dilakukan untuk mencegah ikan yang meloloskan diri. Pada saat pengangkatan jaring, ada nelayan yang bertugas menyusun pemberat dan pelampung secara teratur untuk proses *setting* selanjutnya.

Hasil tangkapan yang diperoleh oleh payang adalah ikan pelagis. Pada alat tangkap payang, hasil tangkapan utamanya adalah teri nasi (*Stolephorus commersonii*), sedangkan hasil tangkapan sampingannya yaitu tongkol (*Auxis thazard*), kembung lelaki (*Rastrelliger kanagurta*), manyung (*Arius thalassimus*), layang (*Decapterus russelli*), tembang (*Sardinella fimbriata*), dan layang (*Decapterus russelli*).

4.2.2.4 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan Jaring Arad

Nggeret adalah istilah yang dipakai Nelayan untuk menyebut operasi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring arad. Jaring arad yang digunakan di Desa Gadon adalah jenis small bottom trawl. Cara kerjanya adalah dengan cara menyaring ikan-ikan yang ada di perairan. Pengoperasiannya dengan cara menghela di belakang perahu yang sedang berjalan.

Urutan pengoperasian alat tangkap jaring arad menurut Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (1996) adalah sebagai berikut :

1. Setelah sampai di *fishing ground* kecepatan perahu dikurangi sehingga bergerak perlahan. Melalui bagian samping kiri buritan kapal penawuran dimulai dengan penurunan kantong, badan, sayap, *danleno* dan palang. Untuk jaring yang pengoperasiannya menggunakan papan *otter*, setelah semua bagian jaring berada dipermukaan air, jaring tersebut dihela supaya kedudukan kedua sayap sejajar. Selanjutnya kedua papan diturunkan secara bersana-sama dan dibiarkan melayang dipermukaan air sambil dihela sampai posisi kedua papan tersebut sempurna.
2. Pada saat penurunan tali penarik, gerakan perahu agak dipercepat. Panjang tali penarik disesuaikan dengan kedalaman perairan.

3. Ujung tali penarik diikat pada bagian depan perahu sedangkan dibagian buritan kanan tali penarik tersebut dihela sejajar perahu diharapkan posisi jaring berada di belakang perahu.
4. Perahu bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu (3-4 knot) dan jaring dihela selama 1-3 jam.
5. Setelah penarikan jaring selesai, mesin dimatikan dan penarikan tali penarik dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia sehingga seluruh jaring terangkat.
6. Hasil tangkapan dikeluarkan dari bagian kantong dengan membuka tali pengikat kantong.
7. Jaring dan tali temali disusun kembali untuk penawuran berikutnya.

Hasil tangkapan utama jaring arad adalah udang rebon (*Penaeus*), sedangkan hasil tangkapan sampingan berupa ikan demersal, kepiting, rajungan, sotong dan cumi-cumi (Sirait 1991). Menurut Manadiyanto *et. al*, (2000), beberapa jenis udang yang tertangkap dengan jaring arad adalah udang jerbung (*Penaeus merguensis*), krosok (*Parapenaeopsis*) dan udang windu (*Penaeus monodon*). Jenis ikan demersal yang tertangkap adalah pepetek (*Leiognathus spp*), gulamah (*Pseudosciana spp*), bloso (*Saurida tumbil*), tenggiri (*Scomberomorus spp*), bawal (*Pampus spp*), kembung (*Rastrellinger spp*), cumi-cumi (*Loligo spp*), manyung (*Arius thalassinus*) dan layur (*Trichiurus spp*). Menurut Diniyah (2001) hasil tangkapan utama jaring arad ialah udang *Penaeid*. Di seluruh perairan Indonesia ditemukan 81 jenis udang *Penaeid*, 46 diantaranya sering tertangkap oleh nelayan Indonesia. Terdapat sembilan jenis udang yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu *Penaeus merguensis*, *P. indicus*, *P. chinensis*, *P. monodon*, *P. semisulcatus*, *P. larisulcatus*, *Metapenaeus monoceros*, *M. ensis* dan *M. elegans*. Udang bersifat bentik, hidup di permukaan

dasar laut. Famili *Penaidae* menyukai daerah atau perairan yang agak keras berupa lumpur berpasir. Hasil tangkapan utama jaring arad di Desa Gadon adalah udang rebon (*Acetes Indicus*).

4.2.2.5 Operasi Penangkapan dan Hasil Tangkapan Dogol

Ndogol adalah istilah yang digunakan nelayan Desa Gadon dalam menyebut operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukot dogol. Secara umum dogol terdiri dari bagian-bagian, yaitu kantong, kaki, tali temali, pelampung dan pemberat.

Untuk pengoperasian dogol dibutuhkan awak kapal (ABK) atau nelayan antara 4-5 orang. Tugas masing-masing adalah 1 orang sebagai pengemudi kapal, 1 orang sebagai navigator dan sisanya untuk pengoperasian alat tangkap tersebut (Subani dan Barus, 1989). Pengoperasian dogol di Desa Gadon sendiri dilakukan oleh 3-5 orang tergantung situasi dan kondisi saat akan *miyang*.

Alat bantu penangkapan dogol adalah gardan. Muhammad, et al, (1997) menjelaskan, Gardan berfungsi untuk menarik warp sehingga memungkinkan penarikan jaring lebih cepat penggunaan gardan tersebut dimaksudkan agar pekerjaan nelayan lebih ringan. Gardanisasi alat tangkap dogol telah membuka peluang baru bagi perkembangan penangkapan ikan, yaitu dengan pemakaian mesin kapal dan ukuran jaring yang lebih besar untuk dioperasikan diperaian yang lebih luas dan lebih dalam.

Tahapan dalam pengoperasian dogol terdiri terdiri dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap persiapan, penentuan *fishing ground*, penurunan jaring (*setting*) dan pengangkatan jaring (*hauling*). Tahap persiapan antara lain persiapan bahan bakar, pengecekan mesin, perbekalan makanan, es, air tawar dan keperluan melaut lainnya. Setelah itu menentukan *fishing ground* kemudian

nelayan mulai mempersiapkan operasi penangkapan dengan meneliti bagian-bagian alat tangkap mengikat tali selambar dengan sayap jaring. Sebelum dilakukan penebaran jaring terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini perlu diperhatikan karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedangkan arus akan mempengaruhi pergerakan ikan. Tahapan selanjutnya adalah penebaran jaring, untuk mendapatkan luas area sebesar mungkin dalam penebaran jaring berbentuk lingkaran dan jaring ditebar dari lambung kapal, dimulai dengan penurunan pelampung tanda yang berfungsi untuk memudahkan pengambilan tali selambar pada saat akan dilakukan hauling. Setelah pelampung tanda diturunkan, kemudian tali selambar kanan diturunkan, lalu sayap sebelah kanan, kemudian badan sebelah kanan, lalu kantong, setelah itu badan sebelah kiri lalu salah satu ujung selambar kiri yang tidak terikat dengan sayap dililitkan pada gardan sebelah kiri. Pada saat melakukan setting kapal bergerak melingkar menuju pelampung tanda. Setelah proses setting selesai terlebih dahulu jaring dibiarkan selama kurang lebih 10-20 menit untuk memberi kesempatan tali selambar mencapai dasar perairan. Kapal pada saat hauling tetap berjalan dengan kecepatan lambat. Hal ini dilakukan agar saat penarikan jaring kapal tidak bergerak mundur karena berat jaring. Penarikan ini dibantu dengan gardan sehingga akan lebih menghemat tenaga, selain itu keseimbangan kapal lebih terjaga karena kecepatan penarikan tali selambar sama dan pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya penarikan ini maka kedua tali penarik dan sayap akan bergerak saling mendekat dan mengejutkan ikan serta menggiringnya masuk dalam kantong jaring. Setelah diperkirakan tali selambar telah mencapai dasar perairan maka secepat mungkin dilakukan hauling pertama-tama pelampung tanda dinaikkan keatas kapal, lalu tali selambar sebelah kanan yang telah ditarik ujungnya dililitkan pada gardan sebelah kanan, kemudian mesin

gardan mulai dinyalakan bersamaan dengan mesin pendorong utama hingga kapal bergerak perlahan-lahan, setelah itu jaring mulai ditarik kemudian tali selambar digulung dengan baik setelah naik diatas kapal, lalu mesin gardan dimatikan dan bagian jaring sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan kapal, jaring ditarik ke atas kapal, badan jaring dan kantong yang bersisi hasil tangkapan dinaikkan ke atas kapal. Dengan ini maka proses hauling selesai dan jaring kembali ditata seperti semula, sehingga pada saat melakukan setting selanjutnya tidak mengalami kesulitan. Lama proses pengoperasian dogol dari mulai persiapan sampai mengambil hasil tangkapan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam.

4.3 Produksi dan Penerimaan

Tujuan akhir dari usaha penangkapan ikan di Desa Gadon adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan bersama keluarga. Karena itu sasaran dari kegiatan usaha penangkapan ikan nelayan adalah bagaimana cara memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah yang banyak dan beragam dengan kualitas yang memadai dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi pendapatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Ismail (2001), Hasil tangkapan yang diperoleh harus dapat dijual tidak saja dengan harga yang layak, tetapi juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena ikan merupakan komoditi yang cepat rusak/busuk apalagi tanpa perlakuan. padahal berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada umumnya nelayan di desa Gadon tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai untuk dapat menjaga kualitas ikan hasil tangkapan mereka. Besar atau kecil volume hasil tangkapan nelayan tidak hanya ditentukan oleh sumberdaya yang mereka miliki, seperti perahu dan alat tangkap serta pengalaman mereka

sebagai nelayan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan laut dan kondisi geografi di mana mereka melakukan usaha penangkapan ikan. Selain faktor lingkungan tersebut diduga terjadinya kenaikan harga BBM pun juga berpengaruh terhadap volume hasil tangkapan ikan disebabkan oleh BBM yang digunakan nelayan untuk melaut merupakan biaya melaut yang dominan dari keseluruhan biaya melaut lainnya dalam operasi penangkapan ikan sehingga untuk mengetahui besaran pendapatan dari usaha penangkapan payang maka dilakukan suatu analisis usaha penangkapan ikan nelayan di Desa Gadon.

4.4 Pemasaran

4.4.1 Saluran Pemasaran

Komoditas perikanan, beberapa jalur sebelum sampai di tangan konsumen akhir. Ada 4 saluran pemasaran perikanan yang terjadi di Desa Gadon. Di bawah ini digambarkan alur pemasaran di Desa Gadon

1. Nelayan ----- Pedagang Pengepul (Besar) -----Eksportir
2. Nelayan ---Pedagang (Kecil) --- Pedagang pengepul (Besar) ---Eksportir
3. Nelayan ---Pedagang pengepul ----- pedagang pengecer -----konsumen
4. Nelayan ----- Pedagang Pengecer-----Konsumen

Perbedaan saluran pemasaran tergantung komoditas yang dihasilkan. Jika komoditas yang dihasilkan adalah produk ekspor , seperti rajungan dan teri nasi, maka saluran yang terjadi adalah yang pertama. Rajungan yang berasal dari nelayan ditampung, kemudian dipasarkan ke pedagang pengumpul merangkap pabrik pengupasan rajungan kemudian dilanjutkan ke eksportir untuk diekspor. Rajungan yang diperoleh pedagang pengumpul tidak hanya berasal dari pedagang kecil tetapi juga secara langsung dari nelayan. Rajungan yang berasal

dari pedagang pengumpul dan dipasarkan ke eksportir berupa daging matang yang telah direbus dan dikupas.

4.4.2 Struktur Pasar

Struktur pasar adalah sifat-sifat atau karakteristik pasar, yang ditentukan oleh empat faktor penentu, yaitu: 1) jumlah atau ukuran pasar, 2) kondisi atau keadaan produk, 3) kondisi keluar atau masuk pasar, 4) tingkat pengetahuan informasi pasar yang dimiliki oleh partisipan dalam pemasaran, misalnya biaya, harga, dan kondisi pasar antar partisipan (Dahl dan Hammond, 1977: 232).

1. Jumlah Pembeli dan Penjual

Jumlah Nelayan sebagai produsen berjumlah lebih dari 1000 orang. Bakul yang membeli ikan langsung dari nelayan berjumlah lebih dari 10 orang. Jumlah pedagang pengepul (besar) pengepul ada 5 orang. Salah satu pedagang pengepul di Desa Gadon adalah UD AF Putra.

2. Jenis Transaksi

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Gadon dilakukan di tempat pedagang pengepul, yang merangkap pabrik pengolahan produk perikanan. Setelah ikan ditimbang, nelayan akan memperoleh nota/bukti transaksi jual beli. Transaksi jual beli Rajungan dan produk ekspor lain antara pedagang pengumpul dengan eksportir dilakukan secara langsung tanpa ada pemesanan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena berapapun jumlah yang masuk ke perusahaan akan diterima untuk memenuhi permintaan ekspor.

3. Keadaan Produk

Komoditas hasil tangkapan nelayan seperti tongkol, teri nasi, dan udang rebon tidak mengalami diversifikasi, bersifat homogen, serta telah dibedakan berdasarkan jenis dan ukuran tertentu. Berbeda halnya dengan rajungan. Rajungan mengalami proses diversifikasi dan dibedakan berdasarkan ukuran tertentu, seperti *size 5* hingga *size 6* untuk Rajungan berukuran besar dan *size 10* hingga *size 12* untuk Rajungan berukuran kecil. Rajungan yang berukuran *size 5* berarti berjumlah lima ekor dalam satu kilogram timbangan. Komoditi Rajungan bersifat homogen (memiliki kesamaan, serupa dalam segala bentuk) dan mengalami diversifikasi berupa perubahan bentuk dan ukuran, yaitu dari Rajungan segar menjadi daging kemasan. Distribusi Rajungan dari nelayan hingga ke pedagang pengumpul berupa Rajungan mentah sedangkan distribusi Rajungan dari pedagang pengumpul ke pihak eksportir berupa daging matang yang dikemas berdasarkan bagian tubuh Rajungan, seperti *Jumbo*, *Fin*, *Lumb* untuk bagian badan dan *CoRp us*, *Merus*, *Lomit* untuk bagian kaki.

3 Kondisi Keluar-masuk Pasar

Mudah-tidaknya seseorang/sebuah lembaga pemasaran keluar atau memasuki pasar dilihat dari adanya persyaratan yang berlaku, seperti: izin berusaha, penguasaan teknologi/pengetahuan, dan besar-kecilnya modal yang diperlukan untuk berusaha. Berdasarkan hasil wawancara, nelayan tradisional, bakul, dan pedagang pengumpul tidak memerlukan izin untuk menjalankan usahanya. Mereka hanya membutuhkan ketersediaan dana bagi keberlangsungan usaha yang sangat bergantung pada alam dan penguasaan pengetahuan/informasi pasar. Akan tetapi, yang lebih berperan dalam industri perikanan adalah penguasaan modal dan informasi pasar. Nelayan membutuhkan cukup modal untuk perbekalan modal melaut sehari-hari. Bila

modal melaut tidak tersedia mereka terpaksa sandar dayung untuk sementara waktu hingga memiliki modal.

Ketersediaan modal merupakan hambatan utama bagi perkembangan usaha nelayan, di samping kondisi cuaca. Tanpa adanya modal yang memadai maka keberlanjutan usaha nelayan akan berakhir. Selain kepemilikan modal, hal lain yang harus dimiliki nelayan adalah pengetahuan membuat jaring. Aktivitas ini dapat dipelajari di sela-sela istirahat melaut sehingga tidak menjadi suatu kendala yang berarti bagi usaha nelayan.

4.4.3 Harga Pasar

1. Penentuan dan Pembentukan Harga

Penentuan dan harga jual beli dilakukan dengan secara sepihak oleh pedagang besar, Nelayan bertindak sebagai penerima harga (*Price taker*) dan tidak berhak menawar. Proses tawar menawar harga juga dilakukan oleh pedagang pengecer dan konsumen akhir yang membeli Ikan . Penentuan harga jual beli Rajungan dan teri nasi ditetapkan secara sepihak oleh pembeli (eksportir). Ketetapan harga dari eksportir menjadi acuan penentuan harga bagi lembaga pemasaran di level bawah, yaitu pedagang besar dan bakul. Kondisi ini mengakibatkan nelayan berperan sebagai *price taker* sedangkan eksportir berperan sebagai *price maker*. Biasanya jika tidak cocok dengan harga yang ditetapkan oleh salah seorang pedagang , nelayan akan menjual hasil tangkapannya ke tempat lain. Akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi, karena harga jual yang ditetapkan antara satu pedagang dengan pedagang lain tidak berbeda jauh, hal ini karena para pedagang mengacu pada harga ekspor yang berlaku saat itu.

1 Sistem Pembayaran Harga

Sistem pembayaran ikan dilakukan secara tunai baik di tingkat nelayan maupun tingkat konsumen akhir. Setelah dilakukan proses penimbangan ikan, nelayan akan menerima pembayaran langsung dan tunai.

4.5 Sistem Pemodalan

Kegiatan perikanan sangat padat modal. Modal yang besar diutamakan untuk membeli sarana produksi seperti perahu, jaring, dan mesin. Sumber-sumber permodalan bagi nelayan adalah tabungan dan harta benda pribadi, pinjaman dari kerabat atau tetangga, dan *pangamba'* (de Jonge, 1989 diacu dalam Kusnadi, 2000: 99). Ketersediaan modal merupakan kendala yang sering dihadapi nelayan untuk menjaga konsistensi usahanya. Kesulitan pemenuhan modal dialami oleh nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya modal yang tersedia.

Persediaan modal digunakan oleh nelayan untuk membeli sarana produksi, biaya peralatan atas kerusakan kapal setiap saat, dan biaya kebutuhan operasi perahu setiap hari. Besar-kecilnya biaya yang dikeluarkan tergantung pada jenis perahu dan tingkat kerusakan alat tangkap. Kebutuhan operasional meliputi: pembelian minyak solar/minyak tanah untuk bahan bakar mesin; minyak tanah untuk bahan bakar lampur, es untuk menjaga kualitas ikan agar tidak mudah busuk; air untuk minum, bahan makanan untuk membuat bekal makan siang dan jajanan seperti beras, mie, sayur, gula, kopi, susu, teh, roti, dan rokok. Biaya operasional biasa disebut juga biaya ransum.

Untuk mengantisipasi kerusakan perahu pada waktu-waktu tertentu, nelayan (terutama juragan) menyisihkan sebagian uang bagi hasil sehingga tidak perlu

berhutang. Akan tetapi, bila persediaan modal tidak ada maka nelayan biasanya meminjam dari pedagang pengepul langganan mereka.

4.6 Analisis Biaya Usaha Penangkapan

4.6.1 Unit penangkapan payang

1. Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada tahap persiapan usaha penangkapan. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian alat tangkap, kapal, dan mesin. Besarnya biaya investasi pada tiap kelompok nelayan usaha penangkapan berbeda-beda. Besarnya biaya investasi penangkapan payang merupakan nilai investasi rata-rata responden yang ditanamkan pada usaha penangkapan payang di Desa Gadon.

Investasi nelayan payang Desa Gadon, dalam usaha penangkapan ikan terdiri atas perahu, alat tangkap dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para responden nelayan diperoleh perhitungan biaya total biaya investasi sebesar Rp. 29.500.000,- berupa perahu sebesar Rp 20.000.000,- alat tangkap payang sebesar Rp 4.500.000,- dan mesin sebesar Rp 5.000.000,-. Perahu merupakan komponen biaya yang paling dominan yaitu Rp 20.000.000,- dibandingkan dengan seluruh biaya pengeluaran dana investasi armada payang. Hal ini disebabkan oleh bahan baku perahu terbuat dari kayu jati (*Tectona grandis*) yang harganya cukup tinggi sehingga berpengaruh pada besarnya biaya perahu. Komponen investasi yang digunakan nelayan dalam usaha penangkapan payang dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6 Pengeluaran biaya investasi unit penangkapan payang di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban tahun 2016

No	Jenis Investasi	Umur Teknis(tahun)	Biaya	Prosentase(%)
1.	Kapal	10	20.000.000,-	68
2.	Mesin	5	5.000.000,-	17
3.	Payang	2	4.500.000,-	15,2
Total			29.500.000,-	100

Sumber : Data Primer (2016).

2. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung kepada volume produksi karena biaya tersebut terus dikeluarkan, meskipun hasil produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Jika operasi penangkapan tidak dilakukan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Tiap kelompok nelayan usaha penangkapan jaring payang mempunyai komponen biaya tetap yang berbeda, bergantung kepada komponen investasi yang dimiliki. Besarnya biaya tetap yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan payang di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden tanpa bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung. Komponen biaya tetap dalam usaha penangkapan payang diantaranya biaya penyusutan kapal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan payang, biaya perawatan kapal, biaya perawatan mesin, dan biaya perawatan alat tangkap. Biaya perawatan mesin dibedakan menjadi dua yaitu pembelian oli dan perbaikan mesin jika terjadi kerusakan. Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan payang di Desa Gadon dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7 Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh usaha penangkapan Payang di Desa Gadon Tahun 2016 per trip/hari

No.	Biaya tetap (FC)	Biaya	Prosentase
1.	Penyusutan Kapal (Rp. 20.000.000,-/10th :12:30)	Rp.5.500,-	17,6
2.	Penyusutan mesin(Rp.5.000.000,-/5.12:30)	Rp.2.800,-	8,9
3.	Penyusutan payang (4.500.00,-/2.12:30)	Rp.6.250,-	20
4.	Perawatan kapal (2.000.000,-/thn :12:30)	Rp.5.600,-	17,9
5.	Perawatan mesin (2.500.000,-/thn :12 :30)	Rp 6.945,-	22,2
6.	Perawatan payang (1.500.000,-/thn :12 :30)	Rp.4.160,-	13,3
Total		Rp.31.255,-	100

Keterangan : 12.30 *) Payang 1 th beroperasi 12 bulan, 1 bulan 30 trip

Sumber : Data Primer (2016).

Total biaya tetap per trip/hari nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan payang adalah Rp 31.225,- dimana nilai komponen tertinggi berupa perawatan mesin sebesar Rp.6.945,- atau 22,2%.

3. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya tidak tetap atau bergantung kepada volume produksi, karena jika operasi penangkapan tidak dilakukan, maka biaya tersebut tidak harus dikeluarkan. Pada tiap kelompok nelayan dalam usaha penangkapan payang, komponen biaya variabel yang digunakan berbeda-beda bergantung kepada kebutuhannya saat operasi penangkapan. Besarnya biaya variabel yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan payang di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Dalam penelitian ini yang termasuk komponen biaya variabel adalah biaya bahan bakar dan perbeklan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para responden nelayan berjumlah 32 orang diperoleh perhitungan biaya operasional melaut unit penangkapan payang terdiri atas biaya bahan bakar sebesar Rp. 450.000,-/bln atau Rp.15.000,-/hari, biaya perbekalan konsumsi sebesar Rp.

300.000,-/bln atau Rp.10.000,-/hari. Biaya yang dikeluarkan untuk perbekalan relatif murah karena juragan tidak perlu membeli lauk pauk, lauk yang digunakan adalah hasil ikan lawuhan hasil tangkapan sebelumnya. Pengeluaran biaya tidak tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan payang dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8 Komponen biaya variabel nelayan usaha penangkapan payang setahun penuh per trip (hari)

No.	Biaya Variabel	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Solar (Rp. 450.000,-/bln)	Rp.15.000,-	60 %
2.	Perbekalan (Rp.300,000,-/bln)	Rp.10.000,-	40 %
Total		Rp. 25.000,-	100 %

Sumber : Data Primer (2016).

4.6.2 Unit penangkapan Wuwu

1. Investasi

Investasi nelayan wuwu Desa Gadon, dalam usaha penangkapan rajungan terdiri atas perahu, alat tangkap dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para 32 responden nelayan diperoleh perhitungan biaya total biaya investasi sebesar Rp. 29.500.000,- berupa perahu sebesar Rp 20.000.000,- alat tangkap wuwu sebesar Rp 4.500.000,- dan mesin sebesar Rp 5.000.000,-

Tabel 9 Komponen biaya investasi nelayan usaha penangkapan wuwu di Desa Gadon Tahun 2016

No	Jenis Investasi	Umur Teknis (tahun)	Biaya	Prosentase (%)
1.	Kapal	10	20.000.000,-	67,8
2.	Mesin	5	5.000.000,-	17
3.	Wuwu @ Rp 15.000,-	2	4.500.000,-	67,8
Total			29.500.000,-	100

2. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung kepada volume produksi karena biaya tersebut terus dikeluarkan, meskipun hasil produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Jika operasi penangkapan tidak dilakukan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Tiap kelompok nelayan usaha penangkapan jaring payang mempunyai komponen biaya tetap yang berbeda, bergantung kepada komponen investasi yang dimiliki. Besarnya biaya tetap yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan wuwu di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden tanpa bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung. Komponen biaya tetap dalam usaha penangkapan payang diantaranya biaya penyusutan kapal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan wuwu, biaya perawatan kapal, biaya perawatan mesin, dan biaya perawatan alat tangkap. Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan wuwu di Desa Gadon dapat dilihat pada Tabel 10

Tabel 10 Komponen biaya tetap nelayan usaha penangkapan wuwu di Desa Gadon Tahun 2016

No.	Biaya tetap (FC)	Biaya	Prosentase
1.	Penyusutan Kapal (Rp. 20.000.000,-/ 10th.12.30)	Rp.5.500,-	17,6
2.	Penyusutan mesin(Rp.5.000.000,-/5.12.30)	Rp.2.800,-	8,9
3.	Penyusutan wuwu (4.500.00,-/2.12.30)	Rp.6.250,-	20
4.	Perawatan kapal (2.000.000/thn :12 :30)	Rp.5.600	17,9
5.	Perawatan mesin (2.500.000:12:30)	Rp.6.945	22,2
6.	Perawatan wuwu (1.500.000 :12:30)	Rp.4.160	13.3
Total		Rp.31.255	100

Keterangan : 12.30 *) wuwu 1 th beroperasi 12 bulan, 1 bulan 30 trip

Total biaya tetap per trip/hari nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan wuwu adalah Rp 31.255,- dimana nilai komponen tertinggi berupa perawatan mesin sebesar Rp.6.945,- atau 22,2%.

3. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya tidak tetap atau bergantung kepada volume produksi, karena jika operasi penangkapan tidak dilakukan, maka biaya tersebut tidak harus dikeluarkan. Pada tiap kelompok nelayan dalam usaha penangkapan payang, komponen biaya variabel yang digunakan berbeda-beda bergantung kepada kebutuhannya saat operasi penangkapan. Besarnya biaya variabel yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan wuwu di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Dalam penelitian ini yang termasuk komponen biaya variabel adalah biaya bahan bakar dan perbekan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para responden nelayan berjumlah 32 orang diperoleh perhitungan biaya operasional melaut unit penangkapan wuwu terdiri atas biaya bahan bakar sebesar Rp.

450.000,-/bln atau Rp.15.000,-/hari, biaya perbekalan konsumsi sebesar Rp. 300.000,-/bln atau Rp.10.000,-/hari. Biaya yang dikeluarkan untuk perbekalan relatif murah karena juragan tidak perlu membeli lauk pauk, lauk yang digunakan adalah hasil ikan lawuhan hasil tangkapan sebelumnya. Pengeluaran biaya tidak tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan wuwu dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11 Komponen biaya variabel nelayan usaha penangkapan wuwu Tahun 2016 per trip (hari)

No.	Biaya Variabel	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Solar (Rp. 450.000,-/bln)	Rp.15.000,-	60 %
2.	Perbekalan (Rp.300,000,-/bln)	Rp.10.000,-	40 %
Total		Rp. 25.000,-	100 %

Sumber : Data Primer (2016).

4.6.3 Unit penangkapan jaring arad

1. Investasi

Investasi nelayan Jaring arad Desa Gadon, dalam usaha penangkapan udang rebon terdiri atas perahu, alat tangkap dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para 32 responden nelayan diperoleh perhitungan biaya total biaya investasi sebesar Rp. 29.000.000,- berupa perahu sebesar Rp 20.000.000,- alat tangkap arad sebesar Rp 4.000.000,- dan mesin sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana yang disajikan pada Tabel 12

Tabel 12 Komponen biaya investasi nelayan usaha penangkapan jaring arad di Desa Gadon Tahun 2016

No	Jenis Investasi	Umur Teknis (tahun)	Biaya	Prosentase(%)
1.	Kapal	10	20.000.000,-	69
2.	Mesin	5	5.000.000,-	17,2
3.	Jaring arad	2	4.000.000,-	13,8
Total			29.000.000,-	100

Sumber: Data Primer (2016).

2. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung kepada volume produksi karena biaya tersebut terus dikeluarkan, meskipun hasil produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Jika operasi penangkapan tidak dilakukan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Tiap kelompok nelayan usaha penangkapan jaring payang mempunyai komponen biaya tetap yang berbeda, bergantung kepada komponen investasi yang dimiliki. Besarnya biaya tetap yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan jaring arad di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden tanpa bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung. Komponen biaya tetap dalam usaha penangkapan jaring arad diantaranya biaya penyusutan kapal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan jaring arad, biaya perawatan kapal, biaya perawatan mesin, dan biaya perawatan alat tangkap. Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan jaring arad di Desa Gadon dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13 Komponen biaya tetap nelayan usaha penangkapan jaring arad di Desa Gadon Tahun 2016

No.	Biaya tetap (FC)	Biaya	Prosentase %
1.	Penyusutan Kapal (Rp. 20.000.000,-/ 10th.12.30)	Rp.5.500,-	18
2.	Penyusutan mesin(Rp.5.000.000,-/5.12.30)	Rp.2.800,-	9,14
3.	Penyusutan jaring arad (4.000.00,-/2.12.30)	Rp.5.600,-	18,3
4.	Perawatan kapal (2.000.00,-/1.12.30)	Rp.5.600,-	18,3
5.	Perawatan mesin (2.500.00.12.30)	Rp.6.945,-	22,7
6.	Perawatan jaring arad (1.500.00,.12.30)	Rp.4.160,-	13,6
Total		Rp.30.605,-	100

Keterangan : 12.30 *) arad 1 th beroperasi 12 bulan, 1 bulan 30 trip

Sumber : Data Primer (2016).

Total biaya tetap per trip/hari nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan payang adalah Rp 30.605,- dimana nilai komponen tertinggi berupa perawatan mesin sebesar Rp.6.945,- atau 22,7%.

3. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya tidak tetap atau bergantung kepada volume produksi, karena jika operasi penangkapan tidak dilakukan, maka biaya tersebut tidak harus dikeluarkan. Pada tiap kelompok nelayan dalam usaha penangkapan payang, komponen biaya variabel yang digunakan berbeda-beda bergantung kepada kebutuhannya saat operasi penangkapan. Besarnya biaya variabel yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan jaring arad di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Dalam penelitian ini yang termasuk komponen biaya variabel adalah biaya bahan bakar dan perbeklan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para responden nelayan berjumlah 32 orang diperoleh perhitungan biaya operasional melaut unit penangkapan arad terdiri atas biaya bahan bakar sebesar Rp. 450.000,-/bln atau Rp.15.000,-/hari, biaya perbekalan konsumsi sebesar Rp. 300.000,-/bln atau Rp.10.000,-/hari. Biaya yang dikeluarkan untuk perbekalan relatif murah karena juragan tidak perlu membeli lauk pauk, lauk yang digunakan adalah hasil ikan lawuhan hasil tangkapan sebelumnya. Pengeluaran biaya tidak tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan jaring arad dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Komponen biaya variabel nelayan usaha penangkapan jaring arad Tahun 2016 per trip (hari)

No.	Biaya Variabel	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Solar (Rp. 450.000,-/bln)	Rp.15.000,-	60 %
2.	Perbekalan (Rp.300,000,-/bln)	Rp.10.000,-	40 %
Total		Rp. 25.000,-	100%

Sumber : Data Primer (2016).

4.6.4 Unit penangkapan Dogol

1. Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada tahap persiapan usaha penangkapan. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian alat tangkap, kapal, dan mesin. Besarnya biaya investasi pada tiap kelompok nelayan usaha penangkapan berbeda-beda. Besarnya biaya investasi penangkapan dogol merupakan nilai investasi rata-rata responden yang ditanamkan pada usaha penangkapan payang di Desa Gadon.

Investasi nelayan dogol Desa Gadon, dalam usaha penangkapan ikan terdiri atas perahu, alat tangkap dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan terhadap para responden nelayan diperoleh perhitungan biaya total biaya investasi sebesar Rp. 30.000.000,- berupa perahu sebesar Rp 20.000.000,- alat tangkap payang sebesar Rp 5.000.000,- dan mesin sebesar Rp 5.000.000,- . Perahu merupakan komponen biaya yang paling dominan yaitu Rp 20.000.000,- dibandingkan dengan seluruh biaya pengeluaran dana investasi armada dogol. Hal ini disebabkan oleh bahan baku perahu terbuat dari kayu jati yang harganya cukup tinggi. Komponen investasi yang digunakan nelayan dalam usaha penangkapan payang dapat dilihat pada Tabel 15

Tabel 15 Pengeluaran biaya investasi unit penangkapan Dogol di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban tahun 2016

No	Jenis Investasi	Umur Teknis (tahun)	Biaya	Prosentase (%)
1.	Kapal	10	20.000.000,-	66,7
2.	Mesin	5	5.000.000,-	16,7
3.	Dogol	2	5.000.000,-	16,7
Total			30.000.000,-	100

Sumber : Data Primer (2016).

2. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung kepada volume produksi karena biaya tersebut terus dikeluarkan, meskipun hasil produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Jika operasi penangkapan tidak dilakukan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Tiap kelompok nelayan usaha penangkapan jaring dogol mempunyai komponen biaya tetap yang berbeda, bergantung kepada komponen investasi yang dimiliki. Besarnya biaya tetap yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan dogol di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden tanpa bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Komponen biaya tetap dalam usaha penangkapan dogol diantaranya biaya penyusutan kapal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan dogol, biaya perawatan kapal, biaya perawatan mesin, dan biaya perawatan alat tangkap. Biaya perawatan mesin dibedakan menjadi dua yaitu pembelian oli dan perbaikan mesin jika terjadi kerusakan. Komponen biaya tetap nelayan dalam usaha penangkapan dogol di Desa Gadon dapat dilihat pada Tabel 16

Tabel 16 Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh usaha penangkapan dogol di Desa Gadon Tahun 2016

No.	Biaya tetap (FC)	Biaya	Prosentase
1.	Penyusutan Kapal (Rp. 20.000.000,-/ 10th.12.30)	Rp.5.500,-	9,23
2.	Penyusutan mesin(Rp.5.000.000,-/5.12.30)	Rp.2.800,-	4,7
3.	Penyusutan dogol (5.000.000,-/2.12.30)	Rp.6.945,-	10,5
4.	Perawatan kapal (2.000.000,-/12.30)	Rp.5.600	25,2
5.	Perawatan mesin (2.500.000,-/12.30)	Rp.6.945	33,6
6.	Perawatan dogol(1.500.000,-/12.30)	Rp.4.160	13
Total		Rp.31.950	100

Keterangan : 12.30 *) dogol 1 th beroperasi 12 bulan, 1 bulan 30 trip

Sumber : Data Primer (2016).

Total biaya tetap per trip/hari nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan dogol adalah Rp 31.950,- dimana nilai komponen tertinggi berupa perawatan mesin sebesar Rp.6.945,- atau 33,6%.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya tidak tetap atau bergantung kepada volume produksi, karena jika operasi penangkapan tidak dilakukan, maka biaya tersebut tidak harus dikeluarkan. Pada tiap kelompok nelayan dalam usaha penangkapan dogol, komponen biaya variabel yang digunakan berbeda-beda bergantung kepada kebutuhannya saat operasi penangkapan. Besarnya biaya variabel yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan dogol di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Dalam penelitian ini yang termasuk komponen biaya variabel adalah biaya bahan bakar dan perbekalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para responden nelayan berjumlah 32 orang diperoleh perhitungan biaya operasional melaut unit penangkapan dogol terdiri atas biaya bahan bakar sebesar Rp. 450.000,-/bln atau Rp.15.000,-/hari, biaya perbekalan konsumsi sebesar Rp. 300.000,-/bln atau Rp.10.000,-/hari. Pengeluaran biaya tidak tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan dogol dapat dilihat pada Tabel 17

Tabel 17 Komponen biaya variabel nelayan usaha penangkapan dogol Tahun 2010 per trip (hari)

No.	Biaya Variabel	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Solar (Rp. 450.000,-/bln)	Rp.15.000,-	60 %
2.	Perbekalan (Rp.300,000,-/bln)	Rp.10.000,-	40 %
Total		Rp. 25.000,-	

Sumber : Data Primer (2016).

4.6.5 Unit penangkapan jaring rajungan

1. Investasi

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada tahap persiapan usaha penangkapan. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian alat tangkap, kapal, dan mesin. Besarnya biaya investasi pada tiap kelompok nelayan usaha penangkapan berbeda-beda. Besarnya biaya investasi penangkapan jaring rajungan merupakan nilai investasi rata-rata responden yang ditanamkan pada usaha penangkapan payang di Desa Gadon.

Investasi nelayan jaring Desa Gadon, dalam usaha penangkapan rajungan terdiri atas perahu, alat tangkap dan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para responden nelayan diperoleh perhitungan biaya total biaya investasi sebesar Rp. 28.000.000,- berupa perahu sebesar Rp

20.000.000,- alat tangkap payang sebesar Rp 3.000.000,- dan mesin sebesar Rp 5.000.000,-. Komponen investasi yang digunakan nelayan dalam usaha penangkapan payang dapat dilihat pada Tabel 18

Tabel 18 Pengeluaran biaya investasi unit penangkapan jaring rajungan di Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban tahun 2016

No	Jenis Investasi	Umur Teknis (tahun)	Biaya	Prosentase (%)
1.	Kapal	10	20.000.000,-	71,4
2.	Mesin	5	5.000.000,-	17,86
3.	Jaring rajungan	2	3.000.000,-	10,71
Total			28.000.000,-	100

Sumber : Data Primer (2016).

2. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung kepada volume produksi karena biaya tersebut terus dikeluarkan, meskipun hasil produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Jika operasi penangkapan tidak dilakukan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Tiap kelompok nelayan usaha penangkapan jaring rajungan mempunyai komponen biaya tetap yang berbeda, bergantung kepada komponen investasi yang dimiliki. Besarnya biaya tetap yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan jaring rajungan di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden tanpa bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung. Komponen biaya tetap dalam usaha penangkapan jaring rajungan diantaranya biaya penyusutan kapal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan jaring, biaya perawatan kapal, biaya perawatan mesin, dan biaya perawatan alat tangkap. Biaya perawatan mesin dibedakan menjadi dua yaitu pembelian oli dan

perbaikan mesin jika terjadi kerusakan. Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan jaring rajungan di Desa Gadon dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 19 Komponen biaya tetap nelayan setahun penuh usaha penangkapan jaring rajungan di Desa Gadon Tahun 2016

No.	Biaya tetap (FC)	Biaya	Prosentase
1.	Penyusutan Kapal (Rp. 20.000.000,-/ 10th.12.30)	Rp.5.500,-	18,85
2.	Penyusutan mesin (Rp.5.000.000,-/5.12.30)	Rp.2.800,-	9,6
3.	Penyusutan jaring (3.000.000,-/2.12.30)	Rp.4.167,-	10,5
4.	Perawatan kapal (2.000.000,-.12.30)	Rp.5.600	19,2
5.	Perawatan mesin (2.500.000,-.12.30)	Rp.6.945	23,8
6.	Perawatan jaring (1.500.000,-.12.30)	Rp.4.160	14,26
Total		Rp.29.172,-	100

Keterangan : 12.30 *) jaring rajungan 1 th beroperasi 12 bulan, 1 bulan 30 trip

Sumber : Data Primer (2016).

Total biaya tetap per trip/hari nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan jaring rajungan adalah Rp 29.172,- dimana nilai komponen tertinggi berupa perawatan mesin sebesar Rp.6.945,- atau 23,8%.

3. Biaya Variabel

Biaya variabel merupakan biaya tidak tetap atau bergantung kepada volume produksi, karena jika operasi penangkapan tidak dilakukan, maka biaya tersebut tidak harus dikeluarkan. Pada tiap kelompok nelayan dalam usaha penangkapan jaring rajungan, komponen biaya variabel yang digunakan berbeda-beda bergantung kepada kebutuhannya saat operasi penangkapan. Besarnya biaya variabel yang digunakan oleh kelompok-kelompok nelayan dalam usaha penangkapan di Desa Gadon merupakan nilai rata-rata biaya yang dikeluarkan responden bergantung pada volume produksi selama usaha penangkapan berlangsung.

Dalam penelitian ini yang termasuk komponen biaya variabel adalah biaya bahan bakar dan perbekalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh perhitungan biaya operasional melaut unit penangkapan jaring rajungan terdiri atas biaya bahan bakar sebesar Rp. 450.000,-/bln atau Rp.15.000,-/hari, biaya perbekalan konsumsi sebesar Rp. 300.000,-/bln atau Rp.10.000,-/hari. Pengeluaran biaya tidak tetap nelayan setahun penuh dalam usaha penangkapan jaring rajungan dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Komponen biaya variabel nelayan usaha penangkapan jaring rajungan Tahun 2016 per trip (hari)

No.	Biaya Variabel	Biaya (Rp)	Prosentase
1.	Solar (Rp. 450.000,-/bln)	Rp.15.000,-	60 %
2.	Perbekalan (Rp.300,000,-/bln)	Rp.10.000,-	40 %
Total		Rp. 25.000,-	100%

Sumber : Data Primer (2016).

4.7 Analisis penerimaan usaha

4.7.1 Unit Penangkapan Payang

Penerimaan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Gadon diperoleh dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan di Desa Gadon. Jenis ikan hasil tangkapan yang paling utama adalah ikan layang, sementara yang lainnya adalah ikan teri, kembung dan pepirik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden, diperoleh hasil penerimaan hasil tangkapan rata-rata ikan per tripnya sebagaimana yang disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21 Rata-rata jumlah hasil tangkapan ikan, harga dan total penjualan nelayan payang per trip di Desa Gadon pada 2016

No	Jenis ikan	Rata-rata tangkapan	Rata-rata harga	Total penjualan
1.	Layang	50	14.000	700.000
2.	Kembung	35	15.000	525.000
3.	Teri	20	5.000	100.000
4.	Pepetek/pepirik	60	1.000	60.000
Jumlah		385	14.000	1.385.000

Sumber : Data Primer (2016).

Hasil tangkapan ikan yang paling banyak adalah jenis ikan layang (*Decaferus Ruselli*) rata-rata sebanyak 50 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 14.000,- sedangkan ikan yang lain adalah ikan kembung perempuan (*Short-bodied mackerel*) 35 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 15.000,-, ikan pepetek (*Slipmouths or Pony fishes*) yaitu 60 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 1.000,00 dan yang paling sedikit adalah ikan teri (*Anchovies*) 20 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 5.000,00. Jumlah rata-rata penerimaan yang diperoleh nelayan payang untuk satu trip rata-rata Rp 1.385.000,-.

4.7.2 Unit Penangkapan wuwu

Penerimaan penangkapan rajungan menggunakan alat tangkap wuwu Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden nelayan diperoleh hasil penerimaan hasil tangkapan rata-rata ikan per tripnya adalah pada Musim Puncak Rata-rata hasil tangkapan per trip = 60 kg/ trip dengan harga perkilo rata-rata Rp.40.000,-/kg, Musim Sedang Rata-rata hasil tangkapan per trip = 30 kg per trip dengan harga Rp.50.000,-/kg, dan Musim Paceklik (Laep) Rata-rata hasil tangkapan per trip = 15 kg per trip dengan harga Rp.60.000,-/kg. Perbedaan harga rajungan disebabkan pada musim puncak stok rajungan melimpah sehingga harga cenderung rendah. Musim sedang dimulai dari bulan

november sampai desember, dimana penelitian dilakukan. Jadi total penerimaan yang diterima nelayan adalah $30\text{kg} \times 50.000 = 1.500.000,-$.

4.7.3 Unit Penangkapan jaring arad

Penerimaan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap jaring arad di Desa Gadon diperoleh dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan di Desa Gadon. Jenis ikan hasil tangkapan yang paling utama adalah udang rebon. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden nelayan diperoleh hasil penerimaan hasil tangkapan rata-rata ikan per tripnya adalah sebesar $\frac{1}{2}$ ton ton dengan harga rebon basah sebesar Rp.4.000,-/kg dan rebon kering sebesar Rp.16.000,-/kg. Dari 100 kg rebon basah setelah dikeringkan susut menjadi 24 kg. Biasanya Nelayan di Desa Gadon menjual rebon dalam bentuk basah. Jadi total penerimaan nelayan $\frac{1}{2}$ ton rebon basah = 500 kg rebon basah dikalikan Rp.4.000,- = 2.000.000

4.7.4 Unit Penangkapan dogol

Penerimaan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dogol di Desa Gadon diperoleh dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan di Desa Gadon. Jenis ikan hasil tangkapan yang paling utama adalah ikan tongkol, sementara yang lainnya adalah ikan teri, kembung dan pepirik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden nelayan diperoleh hasil penerimaan hasil tangkapan rata-rata ikan per tripnya sebagaimana yang disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22 Rata-rata jumlah hasil tangkapan ikan, harga dan total penjualan nelayan dogol per trip di Desa Gadon pada 2016

No	Jenis ikan	Rata-rata tangkapan	Rata-rata harga	Total penjualan
1.	Tongkol	50	19.000	950.000
2.	Kembung	35	15.000	525.000
3.	Teri	20	5.000	100.000
4.	Pepetek/pepirik	60	1.000	60.000
Jumlah		385	14.000	1.635.000,-

Sumber : Data Primer (2016).

Hasil tangkapan ikan yang paling banyak adalah jenis ikan tongkol (*Euthynnus alleteretes*) rata-rata sebanyak 50 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 19.000,00, sedangkan ikan yang lain adalah ikan kembung perempuan (*Short-bodied mackerel*) 35 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 15.000,00, ikan pepetek (*Slipmouths or Pony fishes*) yaitu 60 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 1.000,00 dan yang paling sedikit adalah ikan teri (*Anchovies*) 20 kg dengan harga per kg-nya rata-rata berkisar Rp 5.000,00. Jumlah rata-rata pendapatan yang diperoleh nelayan payang untuk satu trip rata-rata Rp 1.635.000,-

4.7.5 Unit Penangkapan Jaring rajungan

Penerimaan penangkapan rajungan menggunakan alat tangkap jaring Berdasarkan hasil wawancara terhadap para responden nelayan diperoleh hasil penerimaan hasil tangkapan rata-rata ikan per tripnya adalah sebesar , Musim Puncak Rata-rata hasil tangkapan per trip = 50 kg/ trip dengan harga perkilo rata-rata Rp.40.000,-/kg, Musim Sedang Rata-rata hasil tangkapan per trip = 20 kg per trip dengan harga Rp.50.000,-/kg, dan Musim Paceklik (Laep) Rata-rata hasil tangkapan per trip = 5 kg per trip dengan harga Rp.60.000,-/kg.

Perbedaan harga rajungan disebabkan pada musim puncak stok rajungan melimpah sehingga harga cenderung rendah. Musim sedang dimulai dari bulan november sampai desember, dimana penelitian dilakukan. Jadi total penerimaan yang diterima nelayan adalah $20\text{kg} \times 50.000 = 1.000.000,-$.

4.8 Analisis imbalan penerimaan dan biaya (*Revenue-Cost Ratio*)

R/C menurut Primyastanto dan Istikharoh (2006) adalah singkatan dari Revenue Cost Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang bertujuan untuk menyatakan apakah suatu usaha sudah menghasilkan keuntungan atau belum. R/C ratio dapat dirumuskan :

$$R/C = \frac{TR}{TC}$$

Dimana apabila,

$R/C > 1$, maka usaha dikatakan menguntungkan

$R/C = 1$, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi

$R/C < 1$, maka usaha dikatakan mengalami kerugian

Analisis imbalan penerimaan dan biaya (*Revenue-Cost Ratio*) usaha penangkapan nelayan sro'ol di Desa Gadon dapat dilihat dalam Tabel 28.

Alat Tangkap	R/C = TR/TC
1. Payang	$1.385.000,- / 56.255 = 24,6$
2. Wuwu	$1.500.000,- / 56.255 = 26,6$
3. Arad	$2.000.000,- / 56.950 = 35,1$
4. Dogol	$1.635.000,- / 56.950 = 28,7$
5. Jaring Rajungan	$1.000.000,- / 54.172 = 18,5$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan yang dilakukan Nelayan sro'ol di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban menguntungkan.

4.9 Analisis pendapatan usaha penangkapan

4.9.1 Unit Penangkapan Payang

Keberhasilan suatu usaha dapat diketahui dari keuntungan yang diperoleh, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya. Pendapatan usaha penangkapan ikan nelayan Payang per trip dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 23 Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan per trip nelayan Payang di Desa Gadon

I.Penerimaan hasil tangkapan ikan per hari (TR)1 x trip	TR= Rp. 1.385.000,-
FC = 31.255,- VC = 25.000,- TC = FC+VC = 56.255,	TC = Rp.56.255,-
Pendapatan pertrip = TR-TC 1.385.000 – 56.255	Π = 1.328.745

Sumber : Data Primer (2016).

4.9.2 Unit Penangkapan wuwu

Keberhasilan suatu usaha dapat diketahui dari keuntungan yang diperoleh, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya. Pendapatan usaha penangkapan ikan nelayan wuwu per trip dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini.

Tabel 24 Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan per trip nelayan wuwu di Desa Gadon

I.Penerimaan hasil tangkapan ikan per hari (TR)1 x trip	TR= Rp. 1.500.000,-
FC = 31.255,- VC = 25.000,- TC = FC+VC = 56.255,-	TC = Rp.56.255,-
Pendapatan pertrip = TR-TC 1.500.000,- – 56.255,-	Π =1.443.745,-

Sumber : Data Primer (2016).

4.9.3 Unit Penangkapan jaring arad

Tabel 25 Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan per trip nelayan jaring arad di Desa Gadon

I.Penerimaan hasil tangkapan ikan per hari (TR)1 x trip	TR= Rp. 2.000.000,-
FC = 30.605,- VC = 25.000,- TC = FC+VC	TC = Rp.55.605,-
Pendapatan pertrip = TR-TC 2.000.000 – 55.605	□ = 1.944.395,-

Sumber : Data Primer (2016).

4.9.4 Unit Penangkapan dogol

Tabel 26 Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan per trip nelayan dogol di Desa Gadon

I.Penerimaan hasil tangkapan ikan per hari (TR)1 x trip	TR= Rp. 1.635.000,-
FC = 31.950,- VC = 25.000,- TC = FC+VC	Rp.56.950,-
Pendapatan pertrip = TR-TC 1.635.000,- – 56.950,-	□ 1.578.050,-

4.9.5 Unit Penangkapan Jaring rajungan

Tabel 27 Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan per trip nelayan jaring rajungan di Desa Gadon

I.Penerimaan hasil tangkapan ikan per hari (TR)1 x trip	TR= Rp. 1.000.000,-
FC = 29.172,- VC = 25.000,- TC = FC+VC	Rp.54.172,-
Pendapatan pertrip = TR-TC 1.000.000,- – 54.172,-	Π = Rp. 945.528,-

Sumber : Data Primer (2016).

4.10 Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam perahu sro'ol terdiri dari juragan dan mbelah. Juragan adalah sebutan masyarakat setempat untuk Nelayan pemilik perahu. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, nelayan pemilik (juragan) di Desa Gadon, disamping menyediakan modal serta armada penangkapan juga ikut melaut. Hal ini karena topografi Desa Gadon yang terletak di pesisir sehingga banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan pemilik atau juragan.

Peran *Juragan* antara lain:

1. Memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan
2. Menyediakan modal
3. Menyediakan alat tangkap (fishing gear), termasuk
4. Menyediakan kapal tangkap atau perahu.

Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok, juragan juga melakukan: perekrutan anggota kelompok, dan pembagian hasil.

Mbelah adalah sebutan untuk nelayan penggarap atau nelayan buruh (ABK) dalam perahu sro'ol terdiri dari 2-4 orang dan bertugas membantu juragan dalam melakukan kegiatan penangkapan.

Antara juragan dengan ABK umumnya memiliki hubungan kekerabatan, seperti hubungan ayah-anak, adik-kakak, paman-keponakan, dan tetanga dekat. Akan tetapi hal ini tidak menyebabkan tertutupnya peluang bagi ABK yang tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk bekerja, karena pada kenyataannya banyak ditemukan nelayan yang bekerja sebagai ABK tanpa didasari hubungan kekerabatan tertentu.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak buah kapal (ABK) atau mbelah berasal dari komunitas nelayan setempat melainkan banyak buruh tani dari desa setempat yang kemudian ikut bekerja di kapa. Proses perekrutan mbelah terdiri dari 2 jenis yaitu :

a. ABK (Mbelah) tetap atau permanen

Pada umumnya seorang mbelah cenderung menjadi ABK tetap, artinya mereka akan ikut kapal yang sama sepanjang kapal dan pemiliknya masih ada, pada tipe ini biasanya telah terjalin hubungan saling kenal yang berjalan lama antara majikan dan mbelah . Hubungan pertemanan atau saling kenal menjadi ikatan kuat bagi majikan untuk tetap memperkerjakan seorang mbelah. Majikan lebih tenang dalam memperkerjakan mbelah yang sudah lama bekerja padanya, jika dibandingkan dengan mbelah yang baru. Hal ini dikarenakan rasa kekeluargaan dan saling percaya yang berlangsung lama, sebaliknya untuk

mbelah yang baru masih perlu proses pembuktian terhadap kejujuran dan prestasi kerjanya.

b. ABK (Mbelah) sementara

Tipe ini jumlahnya relatif sedikit, karena kebanyakan mbelah baik yang berasal dari masyarakat Desa Gadon maupun petani setempat sudah mempunyai majikan tetap. Tipe kedua ini biasanya ABK menawarkan diri untuk ikut membantu di kapal tertentu. Proses permohonan ijin dilakukan secara lisan kepada majikan yang umumnya langsung memberi ijin dengan pertimbangan ingin menolong orang yang membutuhkan uang. Walaupun demikian sebuah kapal biasanya hanya akan menerima tambahan 1-2 ABK saja karena kan berpengaruh pada pembagian hasil penangkapan.

Namun adapula kasus dimana seorang ABK diminta oleh majikan untuk menggantikan ABK yang tidak bisa ikut melaut karena sedang sakit atau ada kepentingan lain. Dengan pertimbangan bahwa pembagian tugas di kapal telah berjalan dengan baik dengan jumlah ABK yang ada, maka kekurangan tenaga harus segera dipenuhi dengan merekrut ABK sementara.

Perpindahan ABK dari juragan satu ke juragan yang lain dimungkinkan tetapi sangat jarang terjadi di lokasi penelitian, alasan ABK menawarkan diri bekerja pada kapal lain biasanya terdesak karena kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak bisa terjadi karena kemungkinan kapal majikan sedang rusak atau diperbaiki sehingga ABK terpaksa diliburkan.

Kondisi seperti ini sangat merugikan ABK sehingga mereka berusaha ikut kapal lain sambil menunggu kapal majikan melaut lagi. Waktu tunggu yang lama dan tidak pasti kemudian dimanfaatkan ABK yang terdesak kebutuhan ekonomi untuk ikut melaut pada kapal lain.

Spesialisasi pekerjaan nelayan sro'ol di Desa Gadon terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai nahkoda dan ABK biasa. Nahkoda adalah nelayan yang bertugas mengemudikan perahu dan menentukan daerah tangkapan. Nahkoda juga bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi saat melaut. Peran sebagai nahkoda biasanya diemban oleh juragan.

Sebagai mana telah diketahui, pekerjaan nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang hasilnya tidak menentu. Ketidakmenentuan ini telah menciptakan kesepakatan bersama bahwa risiko, keuntungan, dan kerugian yang berkaitan dengan pekerjaan ditanggung secara bersama. Bagi hasil dengan demikian muncul sebagai hasil interaksi dan hubungan kerja yang telah terlembaga.

Dalam rangka menciptakan keadilan bekerja di bidang perikanan, Undang-undang Bagi Hasil Perikanan harus mengatur kegiatan perikanan tangkap dengan pelaku utamanya adalah nelayan dan kegiatan perikanan budidaya dengan pelaku utamanya adalah pembudidaya ikan kecil, khususnya penggarap tambak. Berikut di bawah ini dipaparkan mengenai sistem bagi hasil perikanan pada usaha perikanan tangkap di Desa Gadon.

4.11 Analisis Praktik Bagi Hasil

4.11.1 Studi Kasus Pola Bagi Hasil pada Perikanan Tangkap di Jawa Timur

1. Pola Bagi Hasil di Desa Pesisir, Situbondo

Proses produksi masyarakat nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Situbondo melibatkan dua kelompok, yaitu *orenga* (pemilik perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Pada kasus bagi hasil perahu sleret di Desa Pesisir berlaku dua sistem, yaitu: *Pertama*, sistem bagi tiga (*telon*), hasil

tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: satu bagian untuk *orenga* dan dua bagian untuk *pandhiga*. *Kedua*, sistem bagi dua (*maron*), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, antara lain: satu bagian untuk *orenga* dan satu bagian lagi untuk *pandhiga*. Namun, sistem bagi hasil yang umumnya digunakan oleh masyarakat nelayan Desa Pesisir adalah sistem bagi tiga (*telon*).

Perbedaan pengaturan kedua sistem di atas tersebut disebabkan oleh adanya persepsi bahwa perahu sebagai satu unit produksi, sehingga sistem bagi hasil berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan akan *pandhiga* yang dibutuhkan, spesialisasi pekerjaan, dan biaya operasi atau pemeliharannya (Kusnadi, 2001). Pada sistem *telon*, kerusakan dan kebutuhan peralatan perahu, payang dan kebutuhan bahan bakar besar atau kecil menjadi tanggungan *orenga*. Kebutuhan bahan bakar besar berkaitan dengan pembelian solar, sedangkan bahan bakar kecil berkaitan dengan pembelian minyak gas dan peralatan lampu *strongking*. Jika ada kerusakan mesin, pihak *orenga* dan *pandhiga* lah yang menanggungnya, dengan cara mengambil terlebih dahulu hasil tangkapan (*ngala' tengah* atau *ngala' kadhe*) sebelum dibagi antara *orenga* dan *pandhiga*.

Sementara itu, pada sistem *maron*, pengaturannya berbanding terbalik, dimana pemeliharaan dan kerusakan perahu, payang, mesin dan kebutuhan bahan bakar sepenuhnya menjadi beban atau tanggungan *orenga*. Dengan kata lain, bagian yang diterima *pandhiga* merupakan pendapatan bersih, sehingga *pandhiga* tinggal mengoperasikan perahu yang sudah siap pakai. Menurut nelayan, jika hasil tangkapan banyak, sistem *maron* sangat menguntungkan *orenga*. Sebaliknya, jika hasil tangkapan sedikit atau tidak mendapatkan hasil dan mesin sering rusak, *orenga* akan menanggung beban kerugian yang relatif besar. (Kusnadi,2001)

Disamping jumlah tangkapan, jumlah bagi hasil yang diterima *pandhiga* juga dipengaruhi oleh spesialisasi pekerjaan. Adapun spesialisasi pekerjaan tersebut beserta hasil bagiannya (*sara'an*), yaitu : 1. *Jhuragan* adalah *pandhiga* yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi perahu, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya empat bagian. 2. *Kel-bekel* adalah wakil *jhuragan* yang bertugas membantu *jhuragan*, jumlahnya satu orang dan hasil yang diperolehnya dua bagian. 3. *Madara' Prao* adalah *pandhiga* yang bertugas menjaga dan memelihara perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh dua bagian. 4. *Tokang Jagaan* adalah *pandhiga* yang bertugas mengontak *pandhiga-pandhiga* lainnya untuk bekerja, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh dua bagian. 5. *Tokang Jaga Mesin* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian. 6. *Tokang Pancer* atau kemudi adalah *pandhiga* yang bertugas mengatur arah perjalanan perahu, jumlahnya tiga orang dan setiap orang memperoleh satu bagian. 7. *Tokang lampu* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat, memompa tabung lampu serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia (*anjhang*), jumlahnya enam orang, setiap dua orang bertanggung jawab atas satu pasang lampu *strongking* dan setiap orang memperoleh satu bagian. 8. *Tokang ngoras aeng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang air ke laut, jumlahnya dua orang dan setiap orang memperoleh satu bagian. 9. *Tokang nyobeng* adalah *pandhiga* yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan, jumlahnya satu orang dan memperoleh satu bagian. 10. *Tokang ngereng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang timah ketika menaburkan payang bagian depan dan mengatur perlengkapan timah tersebut, jumlahnya empat orang dan setiap orang memperoleh satu bagian. 11. *Tokang nggorit* adalah *pandhiga* yang bertugas

menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai, jumlahnya sembilan orang dan setiap orang memperoleh satu bagian. 12. *Tokang du'um* adalah *pandhiga* yang bertugas membagi hasil tangkapan, jumlahnya satu orang dan memperoleh satu bagian. (Kusnadi, 2001)

2. Pola Bagi Hasil di Karang Agung, Tuban

Perbedaan jenis alat tangkap dan kapal atau perahu yang digunakan menyebabkan pola bagi hasil berbeda pula. Demikianlah yang terjadi di pesisir Karang Agung, Tuban. Ada beberapa jenis alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan Karang Agung diantaranya purse seine, dogol, dan payang. Dan, ukuran perahu pun bermacam-macam, biasanya alat tangkap purse seine berawak 15-20 orang, sedangkan alat tangkap dogol atau payang berawak 4-5 orang.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, bahwa pola bagi hasil dari kegiatan penangkapan ikan antara pemilik kapal dan ABK akan berbeda berdasarkan jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan. Di Karang Agung misalnya, aturan untuk jenis alat tangkap purse seine yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut. Hasil bersih yang dimaksud adalah nilai ikan hasil tangkapan (raman) dikurangi dengan beberapa biaya yaitu ongkos timbang, biaya perbekalan (konsumsi, bahan bakar, es batu untuk mengawetkan ikan) dan sebagian ikan yang diberikan untuk seluruh awak kapal yang biasa disebut lawuhan serta biaya perawatan kapal atau perahu sebesar 10% dari hasil kotor. Biaya perawatan sebesar 10% - 15% dari hasil kotor atau raman diterima oleh pemilik kapal atau perahu yang disebut juragan darat. Sisa hasil tangkapan atau pendapatan bersih disebut uang tengah (hasil bersih sebelum dibagi antara juragan dan para ABK). Pendapatan bersih tersebut baru dibagi dua antara

juragan darat (pemilik kapal) dan ABK yang jumlahnya 50%. Sementara itu, besarnya bagi hasil untuk ABK dibagikan berdasarkan posisi dan kemampuannya. Bagi ABK yang mempunyai peran ganda atau khusus akan memperoleh lebih dari satu bagian, seperti juru mudi, juru selam, juru lampu, juru mesin, juru arus, "campoan" dan sebagainya. "Campoan" adalah awak kapal yang mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai awak kapal juga mempunyai tugas merawat kapal, membersihkan kapal, mengatur kapal. Adapun besaran bagi hasil yang mempunyai tugas khusus adalah sebagai berikut: juru mudi sebanyak lima bagian ditambah dua bagian diperoleh dari juragan, sedangkan tugas khusus ABK selain sebagai juru mudi masing-masing memperoleh dua bagian.

Sedangkan, pada jenis alat tangkap *dogol* dan *cantrang*, nilai hasil bersih atau uang tengah dibagi antara pemilik dan *pandega* (ABK). Besarnya bagi hasil untuk pemilik perahu/kapal sebanyak 7 bagian dan untuk *pandega* yang tugasnya sebagai juru mudi mendapat 2 bagian, juru buang pukot 1,5 bagian, sedangkan bagi awak kapal biasa mendapat 1 bagian. (Masyhuri,1999)

Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian mengenai bagaimana praktek sistem bagi hasil nelayan *sro'ol* di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

Kerjasama yang dilakukan nelayan Desa Gadon merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang

berhubungan kesepakatan dalam hal pekerjaan, hak dan kewajiban serta pembagian hasil.

4.11.2 Latar belakang terjadinya sistem bagi hasil nelayan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Gadon dituntut untuk bekerja, salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai nelayan. Mayoritas Nelayan di Desa Gadon adalah Nelayan dengan Perahu berukuran Kecil dengan jumlah ABK 2-3 Orang. Sebelum bekerja para nelayan menyediakan alat-alat untuk kebutuhan mencari ikan, kurangnya anggota keluarga laki-laki untuk melaut serta kebutuhan ekonomi masyarakat khususnya dalam keuangan itulah yang menyebabkan para nelayan pemilik kapal bekerjasama dengan nelayan penggarap (*mbelah*) dengan sistem bagi hasil. Nelayan penggarap atau ABK (*mbelah*) di Desa Gadon Sebagian Besar merupakan penduduk dari Desa sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani dan peternak yang beralih menjadi ABK (*mbelah*) ketika tidak ada pekerjaan di lahan pertanian.

4.11.3 Kronologi Proses perjanjian

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Nelayan setempat, diantaranya : Bapak Kamit, Mahfudz, Majid, Jueni, Jueri, Kasom, Salikin, Suyoto dll. Bahwa kehidupan masyarakat nelayan di desa Gadon dilatarbelakangi oleh budaya jawa dan dalam melakukan perjanjian pembagian hasil perikanan dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari seberapa banyak hasil tangkapan yang didapat.

1. Pelaksanaan akad antara Nelayan penggarap/ABK (*mbelah*) dan Pemilik Kapal (*juragan*)

Awal proses terjadinya akad atau perjanjian bagi hasil untuk para nelayan dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis, semua itu karena kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan tolong menolong

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikatakan ketika nelayan bersedia untuk ikut melaut, inilah yang dapat dianggap sebagai awal perjanjian bagi hasil untuk satu kali melaut. Pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian penangkapan ikan yaitu: 1. Pemilik Kapal, Di Desa Gadon, pemilik kapal dan alat tangkapnya disebut Juragan, adapun juragan di Desa Gadon disamping memberikan modal juga ikut melaut. 2. Nelayan Serikat atau anak buah kapal. ABK serikat kapal adalah nelayan yang membantu juragan atau pemilik kapal dalam usaha penangkapan ikan, biasanya masyarakat Desa Gadon menyebutnya dengan sebutan mbelah yang mayoritas berasal dari petani desa tetangga yang sedang tidak menggarap lahan (kebanyakan adalah buruh tani).

Banyaknya kapal motor untuk menangkap ikan di Desa Gadon terdiri dari 3 macam, yaitu : perahu motor besar atau kursin dalam istilah setempat yang biasanya jumlah ABK 20-30 orang, perahu sedang yang biasanya jumlah ABK 6 orang dan perahu motor kecil dengan jumlah ABK 2-4 orang. Karena pada penelitian difokuskan pada perahu motor berukuran kecil yang biasa disebut *sro'ol* oleh masyarakat setempat. Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan di desa gadon pada perahu motor kecil ada beberapa macam seperti dogol, jaring payang, *wuwu* dll.

Dalam setiap kerjasama atau dua orang atau lebih biasanya mempunyai suatu tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Kerjasama antara dua orang atau lebih tersebut melibatkan beberapa

pihak seperti penanam modal atau yang disebut investor yang dalam ini adalah *juragan* dan buruh kerja yang disebut dengan *mbelah*.

Kesepakatan dalam pengolahan dipandang sebagai suatu kerjasama antara pemilik perahu dengan nelayan penggarap atau mbela, kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan dalam kesesuaian dan keadilan, dan yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus jelas dalam kerjasama tersebut :

1. Hak dan Kewajiban pemilik kapal /pemilik modal (Mbelah)

- a) Pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan modal yang terdiri dari kapal dan semua peralatan tangkap.
- b) Apabila terjadi kerusakan maka juragan berkewajiban untuk membiayai semua perbaikan tersebut
- c) Setiap satu tahun sekali memberikan tunjangan misalnya sarung,bersas dll.(biasanya pada saat idut fitri)

Mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya

2. Hak dan Kewajiban ABK (mbelah)

- a) ikut serta dalam menjaga dan merawat kapal serja segala perlengkapan yang digunakan untuk melaut
- b) mengatakan yang yang didapat dari penjualan dengan jujur
- c) mengusahakan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak
- d) Mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya

Bila membahas tentang jangka waktu perjanjian, biasanya masyarakat nelayan Desa Gadon tidak pernah ditentukan sebagaimana yang diatur UU,

namun lebih berdasarkan kebutuhan. Nilai yang dianut oleh masyarakat pesisir jawa khususnya desa gadon dipengaruhi oleh konsep-konsep islam.

4.11.4 Tipe Pola Bagi Hasil

Sistem bagi hasil perikanan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu (Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB, 2002): 1. Sistem bagi hasil sederhana, Sistem bagi hasil sederhana biasanya berlaku pada kapal-kapal kecil (± 5 GT) dengan jumlah ABK sebanyak 2-5 orang. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an* dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan ABK). Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL). Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL) dan biaya perawatan, mesin dan alat tangkap (PKMA), yang menghasilkan pendapatan untuk dibagi (PUD). Untuk perbaikan kapal dan mesin (docking) dan penggantian/penambahan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tidak termasuk ke dalam komponen biaya yang dipotong. Pendapatan untuk dibagi (PUD) lalu dibagi untuk juragan (merangkap nakhoda) dan ABK. Pembagian hasil ini ada yang menggunakan persentase atau point. Besarnya persentase atau point yang jatuh

pada juragan atau ABK tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat atau yang telah berlaku di lokasi yang bersangkutan. Misalnya 60% (enam puluh persen) untuk juragan, maka $BJ=0,60 \times PUD$ dan total bagian ABK = $0,40 \times PUD$. Jika jumlah ABK adalah 5 orang, maka bagian masing masing ABK adalah = $BA/5$. Bagian Bersih Juragan (BBJ) adalah BJ dikurangi dengan biaya administrasi (selain retribusi TPI), yang menjadi tanggungan juragan.

2.Sistem bagi hasil kompleks, Sistem bagi hasil kompleks biasanya berlaku pada kapal-kapal besar ($> 5GT$) dengan jumlah ABK sebanyak 10 orang atau lebih. Dengan ketentuan sebagai berikut: sebelum hasil tangkapan ikan total (HTIT) dijual atau dilelang, disisihkan lebih dahulu sejumlah "lawuhan (L)" atau *sara'an* dalam bentuk natura yang dibagikan kepada setiap orang (juragan, nakhoda dan ABK biasa) dalam jumlah yang umumnya sama. Namun dalam kasus tertentu, juragan mengambil lawuhan lebih banyak dibandingkan dengan nakhoda dan ABK. Sisa hasil tangkapan kemudian dijual atau dilelang (HTIL), yang menghasilkan nilai lelang (NL). Nilai lelang (NL) sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari: (a) biaya tenaga angkut (TA); (b) biaya sewa perlengkapan (SA); dan (c) retribusi TPI (RTR) yang menghasilkan pendapatan kotor (PK). Di beberapa daerah, dimana ikan hasil tangkapan tidak dijual langsung di TPI, maka semua biaya TA, SA dan RTR tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan Kotor (PK) tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut (BOL), dana cadangan (DC) untuk biaya tak terduga, biaya tenaga pembantu juragan (PJ), dan bonus/intensif untuk ABK (BIA) yang terdiri dari nakhoda (BIN), ABK terampil (ABT), dan ABK biasa (BIAB). Sisanya adalah pendapatan untuk dibagi (PUD), yaitu bagian juragan (BJ) dan bagian non juragan (BNJ) dengan

menggunakan persentase tertentu (misalnya bagian juragan 60% dan bagian non juragan 40%, tergantung pada kesepakatan). Bagian Juragan (BJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih juragan (BBJ), tetapi dikurangi dengan biaya administrasi (BAD) di luar retribusi (TPI) dan intensif khusus untuk nakhoda (IKN) dan untuk ABK terampil (IKAT). Bagian non juragan (BNJ) tidak seluruhnya merupakan bagian bersih ABK (BBA), tetapi dikurangi lebih dahulu dengan biaya acara adat (AA) seperti sesaji dan do'a, dan biaya perawatan kapal, mesin dan alat tangkap (PKMA) dengan persentase tertentu atau point (misalnya 0,5 point dari bagian non juragan (BNJ), tergantung pada kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat. Bagian Bersih Juragan (BBA), kemudian didistribusikan kepada Nakhoda (BBN), ABK Terampil (BBAT) dan ABK Biasa (BBAB) dengan menggunakan point (misalnya nakhoda 4 point, ABK Terampil 2 point per orang, dan ABK Biasa 1 point per orang) sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang umumnya berlaku setempat

Berdasarkan data yang didapat dilapangan dapat disimpulkan bahwa pola bagi hasil nelayan sro'ol di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo mempunyai tipenya sendiri, mirip dengan sistem bagi hasil sederhana, hanya yang membedakan adalah tidak adanya pengurangan biaya operasional terlebih dahulu, akan tetapi biaya operasional diambil dari sisa pembagian *bagen* yang disepakati, dengan kata lain bagi hasil yang dilakukan adalah hasil kotor yaitu $\frac{1}{10}$ atau 10% bila yang melaut 5 orang termasuk juragan, $\frac{1}{8}$ atau 12,5% jika 4 orang, dan $\frac{1}{6}$ atau 16% jika bertiga. Paraktek bagi hasil ini disebut *bagen* dalam bahasa masyarakat setempat.

4.12 Praktek Pelaksanaan bagi Hasil antara *Juragan* dan ABK (*Mbelah*)

Perahu kecil cenderung menggunakan 2:1 (*mertelu/nelon*) atau 3:1 (*mrapat*). Dalam hal ini jika pemilik kapal ikut melaut, maka majikan mendapat 2 bagian, 1 bagian sebagai pemilik kapal dan satu bagian lainnya sebagai penyedia perbekalan dan perlengkapan, tidak demikian dengan yang terjadi di Desa Gadon. Dalam praktek *bagen* yang dilakukan di perahu sro'ol ini, jika jumlah orang yang *miyang* 5 orang, terdiri dari 1 *Juragan* dan 4 *Mbelah* biasanya digunakan sistem satu persepuluh ($1/10$), 4 orang, 1 juragan dan 3 mbelah satu perdelapan ($1/8$) dan jika 3 orang yang terdiri dari satu juragan dan 2 mbelah menggunakan sistem satu perenam ($1/6$).

Perbekalan sro'ol hanya memerlukan biaya kecil sekitar Rp. 100.000 – 200.000 dengan rincian diantaranya untuk membeli solar dan kebutuhan pokok sebagai bekal. Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan, pihak juragan menggunakan sistem selesai menangkap ikan, maka para ABK akan mendapat upah sesuai hasil yang didapat. Berdasarkan data dilapangan, maka praktek bagi hasil antara nelayan di Desa Gadon dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gaji pokok

Praktik bagi hasil $1/10$, $1/8$, atau $1/6$ ini didasarkan pada adat setempat dan tetap dipertahankan dengan alasan pembagian tersebut telah sesuai dan seimbang. Contoh kasus : dalam satu kali melaut, hasil yang didapatkan adalah Rp. 1.500.000 nelayan yang ikut berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 *juragan* dan 4 *mbelah* maka $\text{Rp.1.500.000} : 10 = 150.000$, maka masing-masing mendapatkan Rp. 150.000, jika 4 orang terdiri dari 1 *juragan* dan 3 *mbelah* maka $\text{Rp.1.500.000} : 8 = 187.500$, maka masing-masing mendapatkan Rp. 187.500, dan jika 3 orang terdiri dari 1 *juragan* dan 2 *mbelah* maka $\text{Rp.1.500.000} : 6 = 250.000$, maka

masing-masing mendapatkan Rp. 250.000. Sisa uang hasil *bagen* tersebut digunakan untuk biaya-biaya operasional yang dikeluarkan seperti solar, semabako untuk membuat bekal dll, biaya perawatan mesin dan alat tangkap, perbaikan kapal dan mesin dan penggantian/penambahan alat tangkap yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

2. Gaji tambahan

a. Hasil sampingan, biasanya diberikan kepada yang rajin dalam penangkapan ikan atau membantu diluar jam melaut, biasanya yang membantu dalam menjual hasil tangkapan ke pengepul.

b. Adanya ikan *lawuhan* untuk para ABK, ikan *lawuhan* ini pada prinsipnya adalah ikan lauk pauk yang diambilkan dari hasil tangkapan setiap kali melaut, tidak ada patokan pasti dalam pembagian ikan *lawuhan* ini, tergantung hasil tangkapan yang didapat.

c. setiap satu tahun sekali mendapatkan tunjangan (biasanya pada saat idul fitri)

Dengan melihat realita diatas maka, bisa dikatakan bahwa pembagian hasil untuk para ABK bukan hanya uang saja tetapi juga ikan segar hasil tangkapan, biasanya ikan tersebut dibawa pulang oleh ABK dan digunakan sebagai lauk untuk sehari-hari.

Ketaatan masyarakat pada norma-norma yang tidak tertulis berdasarkan tujuan yang nyata dan dijalankan atas dasar nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan saling percaya serta keyakinan bahwa ketentuan itu yang dianggap paling baik dan adil. Mereka menyadari bahwa antara juragan dan mbelah saling membutuhkan satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bagi hasil nelayan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo melakukan perjanjian ketika mau bekerja yang dilakukan di rumah juragan. Praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dirasa telah sesuai dan seimbang. Sistem bagi hasil nelayan ini sama-sama tidak dirugikan, seperti halnya kalau para nelayan tidak mendapatkan hasil (ikan) juragan tidak perlu membayar (mengupah para nelayan) juragan hanya rugi ongkos bensin, sedangkan para ABK juga hanya rugi tenaga. Cara melakukan sistem bagi hasil setelah pulang dari laut para mbelah dan juragan langsung menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul atau tempat pelelangan ikan, setelah itu baru juragan melakukan pembagian hasil yang mana yang telah ditentukan dari awal, dan disepakati oleh mbelah.

4.13 Tinjauan Hukum Terkait bagi hasil

Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan secara tegas menyatakan bahwa dalam satu usaha yang diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, untuk kegiatan perikanan laut, nelayan pekerja memperoleh sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih jika mereka menggunakan perahu layar, dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari hasil bersih bila yang dipergunakan adalah perahu bermotor. Hal ini berarti, bahwa pemilik modal hanya memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu layar, dan sebanyak-banyaknya 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu bermotor. (Pasal 3 UU No. 16 tahun 1964). Lebih lanjutnya, untuk menghindari pemerasan atau eksploitatif terhadap nelayan penggarap dan penggarap tambak, maka pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan bagi hasil

tersebut diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang No. 16 Tahun 1964 ini juga diatur mengenai pembagian beban. Untuk kegiatan perikanan tangkap ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan (nilai jual) setelah dikurangi dengan biaya operasi yang ditanggung bersama antara pemilik modal dengan nelayan pekerja. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan biaya ditanggung bersama adalah beban-beban yang menjadi tanggungan bersama oleh nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. Sedangkan beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap dalam UU nomor 16 tahun 1964 pasal 3 ayat 1(b) yaitu minimum sebesar 40% dari hasil bersih untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap atau ABK (mbelah) dalam sistem bagi hasil perikanan tangkap yang berlaku secara turun temurun di Desa Gadon belum sesuai dengan ketentuan minimum yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Nelayan penggarap atau ABK (mbelah) di desa Gadon biasanya mendapatkan 10% dari hasil kotor jika satu perahu terdiri 5 orang tenaga kerja, artinya rasio bagi hasil yang didapat antara juragan dan ABK sebesar 60:40, 12,5% dari hasil kotor jika 4 orang, dengan rasio bagi hasil sebesar 62,5:37,5 dan 16 % dari hasil kotor jika 3 orang, dengan rasio bagi hasilnya sebesar 68:32.

Aturan main mengenai pola bagi hasil yang diatur oleh pemerintah Secara teoritis diharapkan menciptakan keadilan pada kegiatan usaha perikanan, Namun yang terjadi di lapangan sangat berbeda, karena nelayan lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang telah berlaku turun temurun.

4.14 Alternatif Solusi

Konsep bagi hasil seharusnya memperhatikan optimalisasi kontrak antara juragan dan ABK Konsep bagi hasil antara nelayan juragan dan ABK mestinya berdasarkan tingkat impas usaha (*Break event point*) atau waktu balik modal (*payback period*) sebagai alat ukur indek proporsi tingkat bagi hasil yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengoperasian armada penangkapan setelah tercapainya PP adalah untung yang tinggal dinikmati pemilik.

Hal terpenting bagi kedua belah pihak adalah kondisi simetrik (terpenuhinya informasi bagi masing-masing pihak yang bertransaksi atau melakukan kontrak usaha penangkapan) untuk memenuhi asas rasionalitas dan pareto optimal (pengukuran efisiensi dan alokasi dan distribusi pendapatan dan keuntungan usaha yang paling optimal). Dalam kondisi ideal masing-masing pihak

Untuk mencari rasa adil dalam pola bagi hasil antara pemilik dengan penggarap, sistem bagi hasil alternatif temuan Ditjen Perikanan Tangkap-DKP dan PKSPL-IPB (2002) dan Kusumastanto (2004) bisa dijadikan

rujukan. Mengingat, sistem bagi hasil alternatif memasukan biaya penyusutan. Hadirnya sistem bagi hasil alternatif didasarkan pada adanya ketidakadilan dalam proses pembagian hasil secara adat. Pihak nelayan selalu dirugikan secara sepihak serta menjadi pihak yang selalu menerima tanpa pilihan. Bagi hasil alternatif memakai asumsi bahwa setiap usaha memiliki biaya penyusutan tiap tahun dan pada tahun ke-n biaya investasi akan tertutupi sesuai dengan waktu balik modal (*payback period*), sehingga setelah tahun ke-n diharapkan pendapatan nelayan akan meningkat seiring dengan berubahnya proporsi bagi hasil. Waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya investasi sangat ditentukan oleh jumlah dan harga hasil tangkapan. Selain itu ditentukan juga oleh biaya variabel yang dikeluarkan tiap melaut. Asumsi lain yang digunakan dalam bagi hasil alternatif adalah buruh diposisikan sebagai *share holder* (pemberi masukan dalam setiap pengambilan keputusan) Bagi hasil alternatif menggunakan asumsi biaya variabel, *opow* dan operasional tanggungan bersama. Biaya variabel adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan penangkapan, seperti solar, air, bersih, dan biaya potasi (makan). Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendukung usaha seperti biaya transportasi membeli keperluan makan. Sedangkan biaya penyusutan ditanggung pemilik kapal dengan konsekuensi bahwa proporsi yang didapat pemilik kapal sebelum tahun dimana modal investasi sudah kembali (masa *pay back period*) lebih besar bila dibandingkan dengan proporsi nelayan buruh. Sedangkan setelah mencapai masa pengembalian modal investasi, maka proporsi akan mengalami perubahan menjadi sebaliknya.

Bagi hasil alternatif juga mengakomodir keberatan pemilik mengenai adanya biaya tanggungan pemilik (biaya penyusutan, biaya operasi, biaya perawatan) dan mengakomodir mengenai pembagian proporsi 60% : 40% yang

tercantum dalam UU No. 16 tahun 1964, yang menyatakan bahwa pada perikanan laut jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih. Berdasarkan hal tersebut, maka proporsi yang diterima oleh nelayan pemilik antara 40% - 60% dari hasil bersih sampai masa pengembalian modal investasi dan setelah modal investasi dikembalikan maka nelayan penggarap menerima 60% dari hasil bersih sedang sisanya sebesar 40% untuk pemilik.

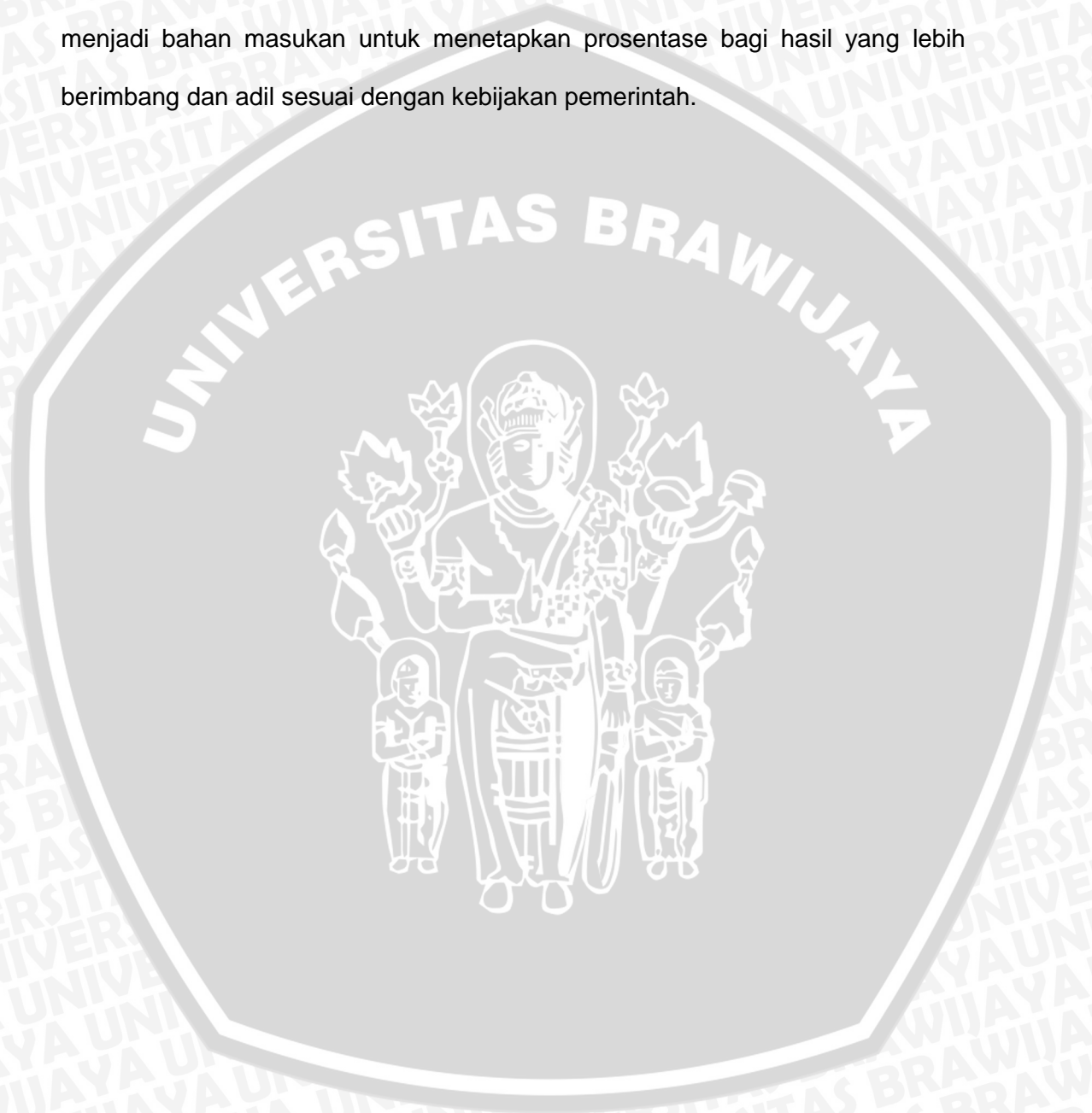
Hukum islam atau yang disebut Sistem *qiradh (mudharabah)* juga dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam sistem bagi hasil perikanan tangkap dimana dalam sistem ini Untuk menentukan keadilan dalam suatu usaha, apakah terjadi proses eksploitatif atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa jauh pertukaran sosial yang bersangkutan memenuhi norma resiprositas. Norma resiprositas dalam Islam dikenal dengan istilah "*Qiradh*" (*profit and loss sharing*), yaitu bagi untung yang sama-sama memikul resiko, dalam suatu bentuk kerjasama (*partnership*) antara pemilik dan pengguna. Sistem *qiradh (mudharabah)* lebih fleksibel namun menuntut kejujuran dan keterbukaan di pihak lain. Fleksibilitasnya adalah terletak pada diserahkannya kepada kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) mengenai besarnya masing - masing persentase keuntungan yang dapat diperoleh dan tidak dibebankannya kewajiban pada penggarap (kecuali bila disengaja) mengakibatkan terjadinya kerugian.

4.15 Implikasi Penelitian

Penelitian ini bisa berimplikasi pada pihak pemerintah juga bagi masyarakat. Bagi pihak pemerintah, pemerintah dapat mengetahui berapa kisaran pendapatan nelayan tradisional dan mekanisme praktik bagi hasil yang dijalankan. Dengan begitu pemerintah bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk

merencanakan kebijakan dan aturan yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat Nelayan.

Sedangkan bagi masyarakat, mereka bisa mengetahui aturan ketentuan praktik bagi hasil perikanan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk menetapkan prosentase bagi hasil yang lebih berimbang dan adil sesuai dengan kebijakan pemerintah.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis terhadap hasil temuan di lapangan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini didapatkan rata –rata pendapatan yang diperoleh Nelayan sro'ol di Desa Gadon adalah, unit penangkapan payang sebesar Rp. 1.778.745, wuwu sebesar Rp.1.443.745, jaring arad sebesar Rp.1.944.395, dogol sebesar Rp.1.578.050 dan jaring rajungan sebesar Rp. 945.528,-
2. Proses perjanjian bagi hasil dikalangan nelayan bukanlah proses ketat dalam bentuk tertulis, tetapi hanyalah kesepakatan lisan yang dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang telah turun temurun. Praktik bagi hasil yang dijalankan antara majikan dengan ABK kapal sro'ol adalah dengan menggunakan sistem 1/10 atau 10% jika dalam satu perahu terdiri dari 5 orang dengan rasio bagi hasil antara juragan dan ABK adalah 60:40, 1/8 atau 12,5% jika 4 orang dengan rasio 62,5:37,5 dan 1/6 atau 16% jika 3 orang dengan rasio bagi hasilnya 68:32 yang telah terjadi selama puluhan tahun. Praktek bagi hasil ini relatif adil, karena jika hasil tangkapan yang diperoleh banyak, pendapatan yang diperoleh juga banyak, sebaliknya jika tidak mendapatkan hasil, juragan hanya rugi ongkos melaut dan ABK hanya rugi tenaga.

5.2 Saran

1. Diperlukan adanya perhatian pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat Nelayan, khususnya nelayan Kecil dan Tradisional
2. UU Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Nelayan

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sudaryanto. **Praktik Bagi Hasil Perikanan Di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah**. Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409-628

Arikunto, S. 2002. **Prosedur Penelitian**. Edisi Revisi V. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Ary Wahyono. **Konflik Bagi Hasil Tangkapan Purse Seine Di Prigi , Trenggalek, Jawa Timur**. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

Ayodhya AU. 1981. **Metode Penangkapan Ikan**. Bogor: Yayasan Dewi Sri

Brandt, A.V. 1984. **Fishing catching methods of the world**. Fishing news book Ltd. :England

Danuri, Rokhim, **Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan**, ch.roin.yusak-yayat/majalah Tokoh Indonesia No. 7

Dahuri, R., J. Rais, S.P.Ginting dan M.J.Sitepu. 2001. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu**. Penerbit PT Pradya Paramitha, Jakarta.

Dahuri, R. 2004. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**, Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta
Danuri, R. 2013. **Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan**, *Majalah Tokoh Indonesia* No. 7 : 15-18

Danies Sadyarta Pratama, Iwang Gumilar, Ine Maulina. **Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur**. Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol.3.No.3, September 2012 :107-116

Deni Jazuli. **Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru**. hlm. 9

Diniah. 2008. **Pengenalan Perikanan Tangkap**. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 62 hal

Ditjen Perikanan Tangkap-DKP, dan PKSPL-IPB. 2002. **Laporan Akhir Evaluasi Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil Usaha Penangkapan di Pantai Utara**, Jakarta..

Effendi, I dan Wawan, O. 2006. **Manajemen Agribisnis Perikanan**. Kanisius. Yogyakarta.

Eko Wahyudi. **Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan (Di Mayangan Kelurahan Blimbing**

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

Imilda Khotim. **Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo**, 2007. <http://022109-imelda-khotim.pdf> -[Masyarakat nelayan] – SumateraPDF.

Kadariah LK dan C Gray. 1999. **Pengantar Evaluasi Proyek**. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 181 hal

Koentjaraningrat. 1981. **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta. Rineka Cipta 391 hal

Martasuganda, S. 1999. **Teknologi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Martasuganda, S. 2002. **Jaring Insang (Gillnet) Serial Teknologi Penangkapan Ikan**. FPIK IPB : Bogor.

Masyhuri (ed). 1999. **Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi**: Telaahan Sebuah Pendekatan. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

Miskiya. 2003. **Aspek Bio-Teknik Jaring Rajungan di Karangantu Kabupaten Serang**, Provinsi Banten. [Skripsi]. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove.1984. **Nelayan dan Kemiskinan, Studi Antropologi Di Dua Desa Pantai**. Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika

Mubyarto, **Nelayan Dan Kemiskinan**, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai, Rajawali, Jakarta, 1984.

Muhartono, Rizky. 2004. **Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara**. (Tidak Dipublikasikan). [Skripsi]. Bogor. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

Mulyadi. 2007. **Ekonomi Kelautan**. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mulyono.1986. **Alat - alat Penangkapan Ikan**. Dinas Kelautan dan Perikanan : Jawa Tengah

Muslim. 2000. **Studi Usaha Penangkapan Rajungan (Portunus sp) di Perairan Cambaya, Kodya Makassar, Sulawesi Selatan**. [Skripsi]. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Nurhakim. 2006. **Peran Lembaga Riset DKP dalam Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Bertanggung jawab**. Di dalam: Sondita, editor. *Seminar Nasional Perikanan Tangkap*; Auditorium Rektorat Institut Pertanian Bogor, 10-11 Agustus 2006. Bogor: IPB Press Hal 33 - 34.

PSKPL-IPB. 2002. **Evaluasi Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil Usaha Penangkapan di Pantai Utara (Pantura)**. Bogor

Primyastanto, Mimit dan Istikharoh, Nunik. 2006. **Potensi dan Peluang Bisnis Usaha Unggulan Ikan Gurami dan Nila**. Bahtera Press. Malang.

Purbayanto A, M Riyanto dan ADP Fitri. 2010. **Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan pada Perikanan Tangkap**. Bogor: IPB Press.

Purhantara, Wahyu. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis**. Edisi pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Retnowati, E. 2011. **Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural**. *Jurnal Perspektif* XVI (3) : 149-159

Samosir, A.2012. **Sektor Perikanan: PNPB Yang Terabaikan**. Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Solicha, 2013. **Terpuruknya Nelayan di Negeri Maritim** (online). <http://http://www.antarajatim.com>. Diakses 2 Juni 2016

Subani,W dan H.R.Barus. 1989. **Alat – alat Penangkapan Ikan dan Udang di Laut Indonesia**. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Departemen Pertanian.

Sugiyono. 2006. **Metode Penelitian Ilmiah**. CV alfabeta. Bandung.

Sugra, M.S. 2014. **Hubungan Tingkat Partisipasi dalam Panglima Laot terhadap Tingkat Taraf Hidup Rumahtangga Nelayan Tradisional (Kasus: Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)**. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Aceh Besar

Suryabrata, S. 2003. **Metodologi Penelitian**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tayyunnisa , Nur Ida Iriani , dan Warter Agustim. **Analisa Pendapatan Dan Sistem Pembagian Hasil Nelayan Jurung Berdasarkan Sarana Dan Musim (Studi Kasus: Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)** *Manjorring in Management* dak@unitri.ac.i

Umar H. 2003. **Studi Kelayakan Bisnis: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif**. Edisi ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang **No. 16 Tahun 1964** tentang Bagi Hasil Perikanan

Vika Annisa Qurrata. **Perbandingan Sistem Bagi Hasil Tiga Alat Tangkap Dan Implikasinya Pada Kesejahteraan Nelayan Desa Sendang Biru Kabupaten Malang**. *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis* Vol. 19. No. 2, April 2014 – ISSN 1402 2006

Wignjodipoero, Soerojo. 1967. **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**. Jakarta. PT. Gunung Agung.

Yulistyo, **Memotret Pemberdayaan Hasil Laut**, dalam Kompas nomor 20 Tahun XVIII tanggal 22-28 Maret 2012.

Yonvitner, A. Rizal, R. Fitrianto. **Tinjauan Sistem bagi Hasil Perikanan Tangkap di Beberapa Lokasi Pantai Utara Jawa (Kasus alat tangkap gillnet dan cantrang)** Seminar Nasional/ Tahunan IV Hasi/ Penelitian Perikanan dan Kelautan. 28 Juli 2007

Yustiarini, Anissa. 2008. **Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan**. Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan. IPB. Bogor.

Zerner, C. 1995. **Sea Change: The Role of Culture, Community, and Property Rights in Managing Indonesian's Marine Fisheries**. New York, Natural Resources and Rights Program Rainforest Alliance.

